

ANALISIS PERKEMBANGAN USAHA INDUSTRI KECIL  
TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA  
DI KABUPATEN WAJO

OLEH :

IRWANSYAH HAYAT  
NO.INDUK : A 211 96 537

*SKRIPSI Sarjana Lengkap Guna memenuhi Sebagian  
Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi  
Jurusan Manajemen Pada Fakultas Ekonomi  
Makassar*

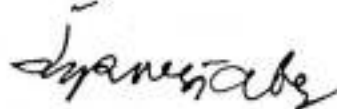
DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING I



Drs. H. Amirullah B. Masry, M.Sc.

PEMBIMBING II



Drs. M. Idrus Taba M.Si.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang sederhana ini dapat tersusun dengan baik. Dan tak lupa shalawat dan taslim penulis ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi pembawa nur bagi umat manusia di dunia dan akhirat.

Perkenankanlah penulis mengetahkan kepada pembaca sebuah skripsi yang menguraikan tentang *Analisis perkembangan usaha industri kecil terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Wajo*, kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, namun penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna.

Pembuatan karya tulis ini sebagai syarat mencapai gelar kesarjanaan merupakan perjalanan panjang yang penuh tantangan dan ujian selama pembuatannya, namun segala kendala itu akhirnya dapat teratasi berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Kedua orang tua, bibinda (H. Joharia, H.Samia), kakanda (K'Iful, K'Enal, K'A.Besse) yang telah memberikan bantuan moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan akhir studi ini.
- Bapak Dekan dan pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin serta stafnya.



- \* Bapak Drs. H. Amirullah B. Masry, M.Sc. dan Drs. M. Idrus Taba, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan petunjuk dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
- \* Bapak Drs. Sahali Baddu yang telah banyak memberikan bantuan selama penulis mengikuti kegiatan organisasi di Universitas Hasanuddin.
- \* Pimpinan dan karyawan instansi/jawatan yang terkait atas kesediaannya memberikan informasi dan data yang bermanfaat bagi penulisan ini.
- \* Sahabat-sahabatku yang manis (Tiwiq, Ima, Erni, Fitto) dan yang cakep (Erwin, Dahri, Ancha), terima kasih atas kebersamaan dalam menjalani dunia kampus.
- \* Anggota Racana Gudep 349 (K'Yoyo, K'Ukhi, K'Hamza, K'Akhe, K'Aso, K'Bayu, K'Hafid, K'Rial, K'Tirta, K'Ubayd, K'Sabil, K'Mizel, K'Yuswan, K'Navy, K'Adhi) dan lain-lain yang penulis tidak sempat menyebut namanya. Terima kasih atas dukungannya.
- \* Anggota Racana Gudep 350 (K'Lilis, K'Linda, K'Amma, K'Lili, K'Masra, K'Ame, K'Yeyen, K'Rita, K'Fitri, K'Gus, K'Umi) dan lain-lain yang penulis tidak sempat menyebut namanya.
- \* Teman-teman anggota Marching Band Universitas Hasanuddin.

Mudah-mudahan Allah SWT memberikan pahala yang berlipat ganda kepada semua pihak di atas. Insya Allah. Amin!

Makassar, 22 Januari 2000

Penulis,

IRWANSYAH HAYAT

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan .....	5
1.4. Hipotesis.....	6
1.5. Sistematika Pembahasan .....	6
BAB II. METODOLOGI .....	8
2.1. Daerah Penelitian.....	8
2.2. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	9
2.3. Jenis dan Sumber Data .....	9
2.4. Metode Analisis.....	10
BAB III. KERANGKA TEORI .....	12
3.1. Pengertian Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja.....	12
3.2. Pengertian Industri dan Industri Kecil.....	18
3.3. Pengertian Produktivitas.....	25
3.4. Penggolongan Industri Menurut Bidang Usahanya.....	26



	3.5. Manfaat Pembangunan Industri Kecil .....	
BAB	IV. PEMBAHASAN .....	33
	4.1. Perkembangan Penduduk .....	33
	4.2. Perkembangan Tenaga Kerja.....	38
	4.3. Masalah Kesempatan Kerja .....	44
	4.4. Keadaan Perkembangan Industri Kecil.....	47
	4.4.1. Jumlah Unit Usaha.....	48
	4.4.2. Jumlah Tenaga Kerja.....	49
	4.4.3. Nilai Investasi .....	50
	4.4.4. Nilai Produksi .....	52
	4.4.5. Nilai Bahan Baku.....	53
	4.5. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Pada Subsektor Industri Kecil di Kabupaten Wajo .....	55
	4.6. Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja pada Subsektor Industri Kecil di Kabupaten Wajo .....	57
	4.7. Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil.....	60
	4.8. Usaha yang telah ditempuh oleh Pemerintah dalam Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil di Kabupaten Wajo .....	64
BAB	V. PENUTUP .....	68
	5.1. Kesimpulan .....	68
	5.2. Saran-Saran.....	70

#### DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR TABEL

		Halaman
I.	JUMLAH PENDUDUK INDONESIA TAHUN 1994-1998 .....	13
II.	JUMLAH TENAGA KERJA DI INDONESIA TAHUN 1994-1998 .....	14
III.	JUMLAH TENAGA KERJA DI SULAWESI SELATAN TAHUN 1994-1998 .....	15
IV.	JUMLAH ANGKATAN KERJA DI INDONESIA TAHUN 1994-1998 .....	17
V.	JUMLAH ANGKATAN KERJA DI SULAWESI SELATAN TAHUN 1994-1998 .....	17
VI.	JUMLAH INDUSTRI KECIL DI INDONESIA TAHUN 1994-1996 .....	24
VII.	JUMLAH INDUSTRI KECIL DI SULAWESI SELATAN TAHUN 1994-1998 .....	24
VIII.	PENGGOLONGAN INDUSTRI MENURUT KODE INTERNASIONAL STANDARD OF INDUSTRIAL CLASIFICATION (ISIC) DENGAN DUA DIGIT .....	28
IX.	PERKEMBANGAN PENDUDUK DI KABUPATEN WAJO TAHUN 1994-1998 .....	36
X.	JUMLAH DAN KEPADATAN PENDUDUK PER KECAMATAN DI KABUPATEN WAJO .....	37
XI.	PENDUDUK KABUPATEN WAJO MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 1994-1998 .....	39
XII.	JUMLAH TENAGA KERJA DI KABUPATEN WAJO TAHUN 1994-1998 .....	41
XIII.	PERKEMBANGAN ANGKATAN KERJA DI KABUPATEN WAJO TAHUN 1994-1998 .....	45
XIV.	PERKEMBANGAN UNIT USAHA PADA INDUSTRI KECIL DI KABUPATEN WAJO TAHUN 1994-1998 .....	48
XV.	PERKEMBANGAN TENAGA KERJA PADA INDUSTRI KECIL DI KABUPATEN WAJO TAHUN 1994-1998 .....	49
XVI.	PERKEMBANGAN JUMLAH INVESTASI PADA INDUSTRI KECIL DI KABUPATEN WAJO TAHUN 1994-1998 .....	51
XVII.	PERKEMBANGAN NILAI PRODUKSI PADA INDUSTRI KECIL DI KABUPATEN WAJO TAHUN 1994-1998 .....	52
XVIII.	PERKEMBANGAN BAHAN BAKU PADA INDUSTRI KECIL DI KABUPATEN WAJO TAHUN 1994-1998 .....	53

# BAB I

## PENDAHULUAN



### 1.1. Latarbelakang

Pembangunan yang dilaksanakan diberbagai negara mengalami banyak perkembangan dari tahun ke tahun, baik pembangunan di sektor pertanian, sektor perdagangan perhubungan, pertambangan dan energi maupun di sektor industri, yang kesemuanya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Demikian halnya dengan negara Indonesia yang masuk dalam kategori negara sedang berkembang, usaha ini pun menjadi pusat perhatian yang masuk dalam kategori negara sedang berkembang, usaha ini pun menjadi pusat perhatian sebagaimana tercermin dalam sasaran pembangunan jangka panjang dibidang ekonomi yaitu terciptanya struktur ekonomi yang seimbang, dimana terdapat kemampuan dan kekuatan industri yang maju yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan pertanian yang tangguh.

Pembangunan industri adalah bagian dari usaha jangka panjang untuk merombak struktur ekonomi yang tidak seimbang karena terlalu bercorak pertanian ke arah struktur ekonomi yang lebih kokoh dan seimbang antara pertanian dan industri. Pembangunan industri ditujukan untuk memperluas kesempatan kerja, pemerataan kesempatan berusaha, meningkatkan ekspor, menghemat devisa, menunjang pembangunan daerah dan memanfaatkan sumber daya manusia. Walaupun demikian usaha tersebut harus tetap bertumpu pada azas strategi pembangunan yang telah dijalankan selama ini yaitu trilogi pembangunan yang

mencakup pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas. Hal ini perlu diperhatikan karena transformasi ekonomi yang mempunyai efisiensi yang lebih tinggi, penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak, output yang lebih beragam dan berkualitas, pemerataan yang lebih mendasar dan stabilitas yang mantap dan dinamis, tidak cukup dilaksanakan hanya dengan pembangunan sektor industri semata.

Akan tetapi dalam pelaksanaan strategi pembangunan tersebut negara kita diperhadapkan pada suatu masalah yang cukup urgen yakni masalah kependudukan. Dalam hal ini adalah penambahan penduduk yang cukup pesat, jumlah penduduk yang besar disatu pihak menggambarkan potensi yang dapat dikerahkan untuk usaha produktif yaitu menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi dilain pihak jumlah penduduk yang besar menunjukkan besarnya tantangan yang harus dihadapi yang merupakan faktor penghambat dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Dengan adanya penambahan penduduk yang pesat itu, menyebabkan bertambahnya tenaga kerja dan angkatan kerja, sedangkan dipihak lain kurangnya lapangan kerja yang dapat menampung penambahan tenaga kerja tersebut. Konsekuensi dari dua keadaan yang bertentangan ini, menimbulkan masalah seperti bertambahnya pengangguran. Disamping itu tenaga kerja yang ada, tingkat produktivitasnya masih rendah, sehingga usaha untuk mencapai tingkat kesejahteraan secara merata masih sukar untuk diwujudkan.

Melihat kenyataan yang kurang menguntungkan tersebut maka pemerintah telah berusaha untuk memperbaikinya yaitu dengan jalan menggalakkan program





pembangunan di segala bidang, khususnya dibidang ekonomi. Dalam hal ini adalah berusaha memperluas kesempatan kerja diseluruh pelosok tanah air melalui pengembangan usaha yang dapat lebih banyak menyerap tenaga kerja.

Untuk menampung tenaga kerja yang semakin hari semakin meningkat, sektor industri terutama subsektor industri kecil merupakan industri padat karya sehingga masalah peledakan tenaga kerja pada sektor kegiatan ekonomi tertentu dapat diatasi.

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (1988) dikemukakan bahwa :

"Perkembangan industri kecil termasuk industri kerajinan dan industri rumah tangga serta yang informal dan tradisional dilanjutkan dan diarahkan untuk memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan ekspor, menumbuhkan kemampuan dan kemandirian berusaha serta meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan pengrajin."<sup>1)</sup>

Dengan memperhatikan kutipan diatas, ini berarti bahwa sektor industri harus semakin dipacu, tidak hanya industri besar dan industri menengah, tetapi juga termasuk industri kecil, ini tidak lain bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan industri besar dan menengah harus dapat merangsang pembangunan industri kecil tersebut.

Demikian halnya pembangunan industri di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Dati II Wajo dimana pembangunan subsektor industri kecil merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan rencana pembangunan industri secara nasional, dimana industri kecil perlu untuk dikembangkan agar dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak dalam usaha memperbesar sumbangannya terhadap pembangunan ekonomi nasional pada umumnya.

---

<sup>1)</sup> Ketetapan MPR No.II/MPR/1988, tentang GBHN (Bahan Penataran dan Bahan Referensi Penataran, Terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1988), Hal 131.

Letak strategis Kabupaten Wajo di tengah jalur lalu lintas perhubungan antara daerah-daerah di utara dan selatan, timur dan barat ditunjang ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan, membuka peluang terhadap pengembangan usaha jasa yang memungkinkan dilakukannya hubungan yang cepat dengan semua daerah di propinsi Sulawesi Selatan. Pengembangan industri-industri disamping potensi daerah disemua sektor memberi peluang usaha pengembangan/ peningkatan mutu maupun produktivitas. Peluang besar terbuka dalam usaha agroindustri dan agrobisnis sehubungan dengan potensi wilayah serta keinginan pemerintah daerah menjadikan Kabupaten Wajo sebagai pusat pembangunan dan pelayanan wilayah timur Sulawesi Selatan.

Selain letaknya yang strategis, kuantitas penduduk Kabupaten Wajo sangat menunjang peningkatan mutu dan produktivitas. Penduduk Kabupaten Wajo tahun 1998 tercatat 596.093 jiwa. Selama lima tahun terakhir yakni dari tahun 1994-1998 laju per laju pertambahan penduduk 0,61% sehingga pada tahun 1998 penduduk Wajo tercatat 405.875 jiwa. Dengan adanya pertambahan penduduk itu menyebabkan bertambahnya tenaga kerja dan angkatan kerja sedangkan di pihak lain kurangnya lapangan kerja yang dapat menampung pertambahan tenaga kerja tersebut.

Melihat hal tersebut, pemerintah Kabupaten Wajo berusaha untuk mengatasi pertambahan penduduk tersebut dengan jalan menggalakkan program pembangunan di segala bidang khususnya di bidang ekonomi. Hal ini dimaksudkan untuk memperluas kesempatan kerja melalui pengembangan usaha yang dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak.

Oleh karena itu, di Kabupaten Wajo khususnya di kota Sengkang sekarang ini sebagian besar penduduknya bekerja di sektor industri kecil, dan yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah industri pembuatan kain sutera yang dilakukan dengan pertenunan ATBM (tradisional) yang secara historis telah digunakan secara turun temurun.

Sejalan dengan pola pemikiran di atas, maka penulis akan menganalisa lebih jauh lagi hubungan perkembangan industri kecil dan peningkatan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Wajo periode 1994-1998.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah yang penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

- a. Berapa besar kemampuan usaha industri kecil menyerap jumlah tenaga kerja yang merupakan bahagian dari angkatan kerja yang terdapat di Kabupaten Wajo.
- b. Berapa besar tingkat produktivitas tenaga kerja pada subsektor industri kecil di Kabupaten Wajo periode 1994-1998.

## **1.3. Tujuan dan Kegunaan**

### **- Tujuan :**

- a. Untuk mengetahui berapa besar tenaga kerja yang dapat diserap oleh subsektor industri kecil dari jumlah angkatan kerja di Kabupaten Wajo.
- b. Untuk mengetahui berapa besar tingkat produktivitas tenaga kerja pada subsektor industri kecil dari jumlah angkatan kerja di Kabupaten Wajo.

- c. Untuk mengetahui keadaan perkembangan subsektor industri kecil, perkembangan penduduk, tenaga kerja, dan angkatan kerja setiap tahunnya serta hambatan-hambatan yang dialami yang dapat dijadikan landasan untuk memberikan pembinaan dan pengarahan.

**- Kegunaan**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan kebijaksanaan Pemda dalam rangka lebih mengembangkan usaha industri kecil di Kabupaten Wajo.
- b. Sebagai salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Jurusan Manajemen.

**1.4. Hipotesis**

- a. Diduga bahwa terdapat peningkatan jumlah tenaga kerja di bidang industri kecil di Kabupaten Wajo, akan tetapi daya serapnya terhadap jumlah angkatan kerja masih kecil.
- b. Diduga bahwa peningkatan produktivitas seiring dengan peningkatan tenaga kerja yang diserap pada subsektor industri kecil di Kabupaten Wajo.

**1.5. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan selanjutnya, maka penulis membagi kedalam komposisi bab sebagai berikut :

- Bab I : Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, hipotesis, dan sistematika pembahasan.
- Bab II : Metodologi berisikan daerah penelitian, prosedur pengumpulan



dan pengolahan data, jenis dan sumber data, dan metode analisis.

**Bab III** : Adalah bab yang membahas beberapa konsep teori mengenai pengertian tenaga kerja dan angkatan kerja, pengertian industri kecil, pengertian produktivitas serta penggolongan industri menurut bidang usahanya serta manfaat pembangunan industri kecil.

**Bab IV** : Adalah merupakan bab inti yang membahas mengenai perkembangan penduduk, perkembangan tenaga kerja, dan masalah kesempatan kerja, keadaan perkembangan industri kecil dan berapa besar tingkat produktivitas tenaga kerja pada sub sektor industri kecil, serta membahas mengenai tingkat penyerapan tenaga kerja dan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan industri kecil di Kabupaten Wajo.

**Bab V** : Merupakan penutup, adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II METODOLOGI PENELITIAN

### 2.1. Daerah Penelitian

Daerah atau tempat penelitian yaitu Kabupaten Wajo, hal ini didasarkan atas beberapa pertimbangan bahwa :

- a. Dengan posisi Kabupaten Wajo yang strategis yaitu di tengah jalur lintas perhubungan antar daerah-daerah di Sulawesi Selatan juga ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai yang dapat mempercepat pertumbuhan sumber-sumber ekonomi yang secara tidak langsung dapat mengatasi masalah ketenagakerjaan.
- b. Kabupaten Wajo selain kedudukannya yang strategis seperti yang dikemukakan di atas, juga sebagai salah satu daerah pembangunan berbagai industri kecil, sebagai berikut :
  - Sentra pengeringan ikan
  - Sentra pembuatan gula merah
  - Sentra pembuatan gula tebu
  - Sentra pengolahan pisau
  - Sentra pengolahan tembakau
  - Sentra pemintalan sutera
  - Sentra pencoletan benang
  - Sentra pertenunan bedokan
  - Sentra pertenunan ATBM
  - Sentra pembuatan bata merah

- Sentra anyam-anyaman
- Sentra meubel kayu
- Sentra pembuatan tampah
- Sentra gerbah
- Sentra kerang-kerangan
- Sentra meubel besi
- Sentra elektronik
- Sentra perbengkelan

## **2.2. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Penulisan skripsi ini didukung dengan prosedur pengumpulan datanya dilakukan secara langsung pada obyek penelitian dan sasaran seperti instansi sebagai berikut : Kantor Departemen Tenaga Kerja, Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Biro Pusat Statistik Kabupaten Wajo.

Lewat penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca buku-buku dan literatur yang ada kaitannya dengan penulisan ini.

## **2.3. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari ketiga pokok departemen yaitu Departemen Perindustrian, Departemen Tenaga Kerja serta dari Biro Pusat Statistik Sulawesi Selatan. Sumber data sekunder ini adalah segala terbitan resmi baik berbentuk angka, grafik maupun gambar. Selain itu, data diperoleh melalui wawancara langsung dengan para pimpinan setiap instansi atau departemen yang penulis kemukakan di atas dan

beberapa staf (1-4 orang) atas dasar petunjuk atau instruksi pimpinan staf instansi atau kantor yang terkait dengan penelitian ini.

Guna melengkapi data-data yang dipergunakan dalam penelitian ini, sumber data lain baik data kuantitatif maupun kualitatif bersumber dari literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **2.4. Metode Analisa Data**

Dalam pembahasan persoalan penduduk dan peluang kesempatan kerja pada subsektor industri di Kabupaten Wajo maka data yang berhasil dikumpulkan dan dikelompokkan, akan diolah secara kuantitatif, kualitatif guna membuktikan kebenaran hipotesis yang dikemukakan selanjutnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan analisis data sekunder

Teknik analisis deskriptif berupa analisis ratio atau analisis prosentase untuk melihat peranan subsektor industri kecil dalam menyerap tenaga kerja di Kabupaten Wajo.

Untuk melihat berapa besar peluang kesempatan kerja pada subsektor industri kecil digunakan rumus "tingkat kesempatan kerja". Dari rumus ini dapat diketahui jumlah tenaga kerja yang terlibat secara aktif dalam kegiatan ekonomi. Adapun rumusan yang dimaksud adalah "tingkat kesempatan kerja" yakni prosentase jumlah yang bekerja pada subsektor industri kecil dibagi jumlah angkatan kerja pada suatu waktu tertentu.

Adapun rumusnya sebagai berikut :





$$N = \frac{P_b}{P_c} \times 100\% \quad ^{21}$$

Dimana :

N = Tingkat Kesempatan Kerja

P<sub>b</sub> = Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada subsektor industri kecil pada suatu waktu tertentu.

P<sub>c</sub> = Jumlah seluruh angkatan kerja pada suatu waktu tertentu

Disamping itu, untuk mengetahui produktivitas kerja pada industri kecil maka digunakan rumus membandingkan antara apa yang dihasilkan (output) dengan masukan (input tenaga kerja).

Untuk itu dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$P_o = \frac{k}{L}$$

Dimana :

P<sub>o</sub> = Produktivitas

k = Kuantitas (output) yang dihasilkan

L = Tenaga kerja (input) yang digunakan dalam proses produksi.

---

<sup>21</sup> Payaman J. Simanjuntak, Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1998, Hal. 12.

## BAB III

### KERANGKA TEORI

#### 3.1. Pengertian Tenaga Kerja Dan Angkatan Kerja

Sebelum diberikan gambaran mengenai perkembangan penduduk, tenaga kerja secara umum di Indonesia, lebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian tentang tenaga kerja menurut beberapa ilmuwan.

Di Indonesia pengertian tenaga kerja belum terdapat konsep pengertian yang seragam. Secara umum tenaga kerja diartikan sebagai sumber daya manusia untuk melakukan pekerjaan.

Pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 Bab I Pasal 1 tentang ketentuan-ketentuan Pokok mengenai tenaga kerja adalah :

"Setiap orang mampu melakukan pekerjaan, di dalam maupun di luar hubungan pekerjaan, guna menghasilkan barang-barang maupun jasa-jasa memenuhi kebutuhan masyarakat."<sup>3)</sup>

Pengertian tenaga kerja menurut Sisdjiatmo Kusumosuwijho adalah :

"Jumlah seluruh penduduk dalam satu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka berpartisipasi dalam aktivitas tersebut."<sup>4)</sup>

Pengertian tenaga kerja ditinjau dari segi demografi adalah setiap orang atau penduduk yang termasuk kelompok umur 18 tahun ke atas, yang bekerja dan atas pekerjaan yang dilakukan memperoleh imbalan jasa, ada penduduk berumur 18 tahun ke atas dan bekerja tetapi tidak dikategorikan tenaga kerja, karena tidak

---

<sup>3)</sup> Yudo, Swasono dan Endang Sulistyarningsih, Metode Perencanaan Tenaga Kerja, BPFE, Yogyakarta, 1995, Hal 20.

<sup>4)</sup> Sisdjiatmo Kusumowidho, Dasar-dasar Demografi, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.

mendapat imbalan jasa, dan kelompok penduduk ini disebut family works sedangkan ditinjau dari segi ekonomi, tenaga kerja diartikan sebagai seorang atau jumlah orang dalam usia kerja yang secara langsung turut serta memberikan pengorbanan yang berupa kemampuan tenaga kerja ataupun pikiran dalam proses produksi, yang berhak menerima upah sebagai balas jasa dari benda dan jasa-jasa yang dihasilkan.

Di Indonesia pengertian tenaga kerja atau Man Power yang mengacu pada pengertian tenaga kerja yang dikemukakan oleh Payman J. Simanjuntak dalam Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia yaitu:

"Pemilihan umur minimum 18 tahun sebagai batas umur minimum tenaga kerja adalah berdasarkan kenyataan bahwa dalam umur tersebut sudah mempunyai kemampuan bekerja dan menghasilkan uang, maka sejak itu dikategorikan sebagai tenaga kerja."<sup>5)</sup>

Secara praktis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja dibedakan hanya oleh batas umur. Tujuan dari pemilihan batas umur tersebut adalah supaya definisi yang diberikan sedapat mungkin menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Setiap negara memilih batas umur yang berbeda berdasarkan expectation live penduduk di negara yang berbeda.

TABEL I  
JUMLAH PENDUDUK INDONESIA  
TAHUN 1994-1998

Tahun	Jumlah Penduduk Indonesia (Jiwa)	Perkembangan	
		Absolut	Prosentase
1994	192.216.500	-	-
1995	195.283.200	3.066.700	1,6
1996	198.320.100	3.036.800	1,6
1997	201.353.100	3.033.100	1,5
1998	203.730.000	2.376.900	1,2

Sumber : BPS, Sulawesi Selatan.

<sup>5)</sup> Payman J. Simanjuntak, Loc. Cit.

**TABEL II**  
**JUMLAH TENAGA KERJA INDONESIA**  
**TAHUN 1994-1998**

Tahun	Jumlah Tenaga Kerja (orang/jiwa)	Perkembangan	
		Absolut	Prosentase
1994	81.888.368	-	-
1995	85.155.026	3.266.657	4,0
1996	88.291.871	3.136.846	3,7
1997	91.324.911	3.033.040	3,4
1998	94.001.876	2.676.965	2,6

Sumber : BPS, Sulawesi Selatan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari tabel di atas, bahwa selama jangka waktu lima tahun jumlah penduduk Indonesia mengalami peningkatan dari segi kuantitas, akan tetapi dari segi prosentase mengalami penurunan (tabel I, hal. 13).

Berkenaan dengan keadaan tersebut, jelas bahwa perkembangan penduduk sudah mulai terkendali, hal ini tidak luput dari upaya pemerintah dalam mengatasi atau menekan laju pertumbuhan penduduk melalui program secara nasional, antara lain pelaksanaan program keluarga berencana, padat karya serta pembangunan pusat-pusat latihan kerja baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta, yang walaupun kesemuanya itu relatif belum memenuhi tuntutan sebagian besar penduduk Indonesia, khususnya yang berada di daerah-daerah pedesaan lebih khusus lagi di daerah tingkat II Kabupaten Wajo.

Menilik perkembangan penduduk yang mengalami penurunan dari segi prosentase berakibat pada jumlah tenaga kerja (tabel II, hal 14). Di tahun 1994, jumlah penduduk 192.216.500 jiwa terdapat 42,60% merupakan tenaga kerja. Tahun 1995 sebanyak 43,60%. Tahun 1996 terdapat 88.291.871 jiwa tenaga kerja dari 198.320.000 jiwa penduduk. Di tahun 1997 dan 1998 secara berturut-turut terdapat



45,35% dan 46,14%. Melihat kenyataan ini, dapat disimpulkan bahwa jumlah tenaga kerja meningkat dari tahun ke tahun dari segi prosentase berbanding dengan jumlah penduduk setiap tahunnya. Akan tetapi peningkatan tenaga kerja itu sendiri mengalami penurunan prosentase dari tahun ke tahunnya. Secara itu, jumlah tenaga kerja di Sulawesi Selatan juga mengalami peningkatan tahunnya pada periode tahun 1994-1998.

**TABEL III**  
**JUMLAH TENAGA KERJA SULAWESI SELATAN**  
**1994-1998**

Tahun	Jumlah Tenaga Kerja (orang/jiwa)	Perkembangan	
		Absolut	Prosentase
1994	5.880.148	-	-
1995	5.910.712	30.564	0,5
1996	5.954.100	43.388	0,7
1997	6.053.503	99.403	1,6
1998	6.162.244	108.741	1,7

Sumber : BPS, Sulawesi Selatan.

Berdasarkan data di atas, jumlah tenaga kerja di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan, akan tetapi jika membandingkan dengan peningkatan tenaga kerja di Indonesia mengalami penurunan. Di tahun 1994 hanya berkisar 7,18% tenaga kerja Indonesia berada di Sulawesi Selatan. Selanjutnya secara berturut-turut tahun 1995, 1996, 1997 dan 1998 mengalami penurunan 6,94%, 6,74%, 6,63% dan 6,56%.

Dari sekian jumlah tenaga kerja yang diberikan di atas, ada sebagian jumlah tenaga kerja tersebut yang tidak aktif mencari pekerjaan. Tenaga kerja ini digolongkan angkatan kerja (*labor force*). Namun sebelum melihat perkembangan angkatan kerja itu sendiri, terlebih dahulu akan dipaparkan beberapa pengertian tentang angkatan kerja.

Jadi pengertian angkatan kerja menurut Yudo Swasono adalah :

"Bagian daripada penduduk yang masuk usia yang bekerja maupun sementara mencari pekerjaan, yang masih mau dan mampu untuk melaksanakan pekerjaan"<sup>6)</sup>

Sedangkan pengertian angkatan kerja menurut Sisdjatmo adalah :

"Bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan peroduktif yaitu memproduksi barang dan jasa."<sup>7)</sup>

Menurut Sensus Penduduk Tahun 1998, yang dimaksud dengan angkatan kerja ialah :

"Penduduk usia 18 tahun ke atas yang selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab, seperti yang sedang menunggu panen, atau pegawai yang sedang menjalani vuti, disamping itu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang menunggu untuk bekerja dan mereka yang sementara mencari pekerjaan."<sup>8)</sup>

Sedangkan yang tidak termasuk angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari pekerjaan. Jadi mereka ini adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya tidak terlibat dalam kegiatan produktif, yaitu memproduksi barang dan jasa.

Adapun yang tidak termasuk kelompok angkatan kerja terdiri dari tiga golongan yaitu :

1. Golongan yang masih bersekolah, yaitu mereka yang kegiatannya hanya atau terutama bersekolah.
2. Golongan yang mengurus rumah tangga, yaitu mereka yang mengurus rumah tangga tanpa memperoleh upah. (family works)

---

<sup>6)</sup> Yudo, Swasono, Loc.Cit.

<sup>7)</sup> Sisdjatmo, Loc.Cit.

<sup>8)</sup> Ibid, Hal 87.

3. Golongan lain-lain, dimana yang termasuk dalam golongan ini ada dua macam, yaitu :
- Penerima pendapatan, yakni mereka yang tidak melakukan suatu kegiatan ekonomi tetapi memperoleh pendapat seperti tunjangan pensiun, bunga simpanan atau surat atas milik dan sebagainya.
  - Mereka yang hidupnya tergantung dari orang lain misalnya karena lanjut usia, cacat, dalam penjara atau sakit kronis.<sup>9)</sup>

Untuk mengetahui perkembangan jumlah angkatan kerja di Indonesia dan di Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL IV**  
**JUMLAH ANGGKATAN KERJA INDONESIA**  
**1994-1998**

Tahun	Jumlah Angkatan Kerja (orang/jiwa)	Perkembangan	
		Absolut	Prosentase
1994	73.126.956	-	-
1995	76.193.637	3.066.681	4,2
1996	79.230.413	3.036.776	4,0
1997	82.263.526	3.033.113	4,0
1998	84.640.442	2.376.886	3,8

Sumber : BPS, Sulawesi Selatan.

**TABEL V**  
**JUMLAH ANGGKATAN KERJA SULAWESI SELATAN**  
**1994-1998**

Tahun	Jumlah Angkatan Kerja (orang/jiwa)	Perkembangan	
		Absolut	Prosentase
1994	1.942.948	-	-
1995	1.967.678	24.730	1,2
1996	2.002.281	34.603	1,7
1997	2.059.043	56.762	2,8
1998	2.118.395	60.352	2,9

Sumber : BPS, Sulawesi Selatan.

<sup>9)</sup> Payaman J. Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1998, Hal 6.

Data jumlah angkatan kerja di Indonesia seperti terlihat pada IV, menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun walaupun dengan jumlah yang menurun.

Oleh karena itu, dari segi prosentase juga mengalami penurunan yang secara drastis khususnya di tahun 1997 ke 1998. Akan tetapi, berbeda halnya dengan jumlah dari tahun ke tahun sepanjang periode 1994-1998 (tabel V hal.17).

Jumlah angkatan kerja Sulawesi Selatan jika dibandingkan dengan angkatan kerja Indonesia hanya sekitar rata-rata 2,55% setiap tahunnya, tahun 1994 sekitar 2,66%, tahun 1995 sebanyak 2,58%, tahun 1996 berkisar 2,53% dan tahun 1997 dan 1998 sebesar 2,50%. Penurunan ini terjadi disebabkan oleh jumlah angkatan kerja di Indonesia yang mengalami penurunan setiap tahunnya.

### 3.2. Pengertian Industri dan Industri Kecil

Setelah melihat perkembangan tenaga kerja dan angkatan kerja yang merupakan pendukung industri, berikut penulis akan mengemukakan pengertian-pengertian industri dan industri kecil agar argumen-argumen yang dikemukakan nantinya dapat terarah.

Berbicara tentang pengertian industri, banyak ahli dan lembaga yang memberikan definisi, baik secara umum maupun secara khusus. Pada umumnya industri mempunyai dua pengertian yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas, yaitu:

1. Industri dalam arti sempit dimaksudkan sebagai kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang sejenis.
2. Industri dalam arti luas berarti kumpulan dari perusahaan pada umumnya.

Selanjutnya penulis menyajikan beberapa pengertian tentang industri yang antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut :



Pengertian industri menurut L. Meyers adalah :

"An industry is a growth of firms producing a homogeneous commodities that are close substitutes for each other."<sup>10)</sup>

Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat diambil suatu makna pengertian bahwa yang dimaksud dengan industri adalah pabrik yang memproduksi barang-barang yang sejenis atau sekelompok barang-barang yang dapat disubstitusikan antara satu dengan yang lain:

Sedangkan Moch. Sadli memberikan pengertian industri sebagai berikut :

"Industri adalah merupakan kumpulan-kumpulan dari perusahaan-perusahaan atau pabrik yang memproduksi suatu barang yang serupa."<sup>11)</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan industri adalah suatu kumpulan dari perusahaan yang melaksanakan kegiatan produktif yaitu menghasilkan barang-barang yang sejenis atau kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang melaksanakan kegiatan produktif dengan menggunakan proses bahan baku yang sama.

Departemen Perindustrian sebagai lembaga yang menangani sektor industri di Indonesia, memberikan pengertian industri yang tertuang dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian, menegaskan :

"Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi atau barang jadi dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri."<sup>12)</sup>

---

<sup>10)</sup> L. Meyers, The Element of Modern Economics, New York, Prentice Hall, Inc., 1966, Hal 148.

<sup>11)</sup> Moch. Sadli, Industrial Economics, Bina Kawan Studi Club, Universitas Indonesia, Jakarta, 1991, Hal.49.

<sup>12)</sup> Departemen Perindustrian Republik Indonesia, Undang-undang No.4 Tahun 1984 Tentang Perindustrian, Jakarta, 1984, hal 62.

Dengan berdasarkan pada pengertian-pengertian yang telah dikemukakan tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dengan industri adalah aktivitas (kegiatan) ekonomi yang dikelola oleh manusia dalam usaha untuk meningkatkan kegunaan dari sumber barang, selanjutnya diolah melalui suatu proses produksi agar dapat memenuhi tuntutan akan kebutuhannya, yang terbentuk dalam suatu hasil produksi yang dapat berdaya guna bagi manusia.

Sedang untuk mengetahui perbedaan antara perusahaan industri besar, industri menengah dan industri kecil, maka dapat dilihat dari sudut pemakaian tenaga kerja dan peralatan-peralatan lainnya yang digunakan dalam proses produksi.

Menurut Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 294/M/SK/IV/1972, yang menyangkut tentang penggunaan tenaga kerja dan peralatan yang dipakai di bidang industri, maka dapat diketahui penggolongan industri yang ada di Indonesia menurut besarnya yakni :

1. Industri besar adalah industri yang menggunakan lebih dari 100 orang tenaga kerja tanpa menggunakan mesin, atau menggunakan lebih dari 50 orang tenaga kerja dengan menggunakan mesin.
2. Industri sedang adalah industri yang menggunakan 10 orang sampai 99 orang tenaga kerja tanpa menggunakan mesin, atau menggunakan 10 orang sampai 49 orang tenaga kerja dengan menggunakan mesin.
3. Industri kecil adalah industri yang menggunakan lebih sedikit 10 orang tenaga kerja tanpa menggunakan mesin, atau menggunakan lebih sedikit dari 5 orang tenaga kerja menggunakan mesin.

Selanjutnya berdasarkan sifat dan keadaan industri, maka nampaknya terdapat hal-hal yang dapat membedakan antara satu industri dengan industri lainnya. Perbedaan yang dimaksud adalah dari segi aktivitas yang dijalankannya, yang antara lain dapat membedakan antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan yang dimaksud adalah dari segi aktivitas yang dijalankannya, yang antara lain dapat membedakan antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan yang dimaksud adalah dari segi aktivitas yang dijalankannya, yang antara lain dapat disebutkan adalah segi penerapan tenaga kerja, peranan output yang dihasilkan, penguasaan pemanfaatan tingkat teknologi, permodalan yang dimiliki karakteristik yang berbeda antara satu industri dengan industri lainnya. Oleh karena itu dengan berdasarkan pada hal-hal tersebut dan sesuai dengan telaahan yang akan dibahas, maka penulis akan membatasi secara khusus pada subsektor industri kecil dalam hubungannya dengan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Wajo.

Sebelum penulis menguraikan pengertian tentang industri kecil, perlu dijelaskan bahwa batasan industri kecil ini sudah beberapa kali mengalami perubahan. ini dikarenakan semakin berkembangnya usaha industri kecil tersebut. Pengertian industri kecil yang dipergunakan sebagai kriteria No. 133/M/SK/8/1979, Tentang perubahan terhadap Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Industri Kecil, yang meliputi :

a. Kriteria Fisik

1. Investasi modal untuk mesin-mesin dan peralatan yang bernilai Rp. 70,- juta ke bawah.
2. Pemilik usahanya adalah warga negara Indonesia.

3. Nilai investasi pertenaga kerja tidak lebih dari Rp. 650.000,-
- b. Dalam membina industri kecil, maka faktor-faktor lain yang diutamakan adalah :
1. Pemilik adalah golongan ekonomi lemah pada umumnya sekaligus menjadi pimpinan perusahaan dan memerlukan bimbingan kewiraswastaan.
  2. Administrasi perusahaan umumnya masih bersifat sederhana dan kurang teratur serta belum terbentuk badan hukum (non corporate based).
  3. Tidak berkemampuan untuk mengadakan jaminan guna mendapatkan kredit dari dunia perbankan.
  4. Hubungan kerja antara pengusaha dan karyawan belum formal dan masih bersifat kekeluargaan.
  5. Pada umumnya sistem pembiayaan dan pemodalannya belum memungkinkan untuk mengadakan persediaan yang cukup untuk kontinuitas produksi.
  6. Proses produksinya masih sangat sederhana dan sebahagian besar masih bersifat tradisional.
  7. Mutu produksinya belum tetap dan desainnya kurang mengikuti selera pasar.
  8. Lemah dalam pemasaran hasil-hasil produk sendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut, klasifikasi industri berdasarkan sasaran prioritas yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Kelompok industri bernilai politik strategi, adalah kelompok industri yang terutama memegang peranan penting daripada ekonomi namun didalamnya ada terkandung aspek-aspek pemupukan dana (ekspor).
2. Kelompok industri sekunder (manufakturing), adalah kelompok industri yang tergolong dalam industri-industri pembuatan barang-barang jadi, pemasaran hasil

produksi pada umumnya dilakukan semata-mata di dalam negeri atau sebagian dilakukan semata-mata di dalam negeri, disamping itu, kelompok ini juga melayani pasaran konsumen atau pasaran industri.

3. Kelompok industri berdasarkan keterampilan tradisional adalah kelompok industri pada umumnya dilandaskan pada keterampilan yang telah membudaya pada masyarakat setempat, belum menggunakan teknologi tinggi dan menghasilkan barang-barang konsumen yang sederhana.
4. Kelompok industri pedesaan ini merupakan suatu kegiatan yang berifat tambahan bagi para petani dan pemasaran hasilnya (produksi) terbatas atau berkisar pada daerah setempat.
5. Kelompok industri penghasil benda-benda seni, adalah kelompok industri yang dilandasi dengan keterampilan cita rasa seni yang telah membudaya pada daerah setempat.

Dengan memiliki keadaan klasifikasi industri tersebut, maka nampak bahwa kelompok yang dikategorikan sebagai industri kecil adalah kelompok tiga, empat, dan lima.

Setelah mengulas pengertian-pengertian tentang industri kecil, berikut ini disajikan data tentang perkembangan jumlah industri kecil di Indonesia dan di Sulawesi Selatan.

**TABEL VI**  
**JUMLAH INDUSTRI KECIL DI INDONESIA**  
**1994-1998**

Tahun	Jumlah Industri Kecil	Perkembangan	
		Absolut	Prosentase
1994	168.154	-	-
1995	190.767	22.613	13,45
1996	228.978	38.211	20,03
1997	241.169	12.141	5,32
1998	263.226	22.057	9,15

Sumber : BPS, Sulawesi Selatan.

**TABEL VII**  
**JUMLAH INDUSTRI KECIL DI SULAWESI SELATAN**  
**1994-1998**

Tahun	Jumlah Industri Kecil	Perkembangan	
		Absolut	Prosentase
1994	69.835	-	-
1995	71.886	2.051	2,94
1996	76.094	4.208	5,85
1997	77.062	968	1,27
1998	79.027	1.965	2,55

Sumber : BPS, Sulawesi Selatan.

Dari data di atas, disimpulkan bahwa jumlah industri kecil di Indonesia maupun di Sulawesi Selatan menunjukkan peningkatan di tiga tahun pertama selama periode tahun 1994-1998. Tahun 1994 jumlah industri kecil di Indonesia 168.154 sedangkan di Sulawesi Selatan sebesar 69.835 jadi ada sekitar 41,53% industri kecil berada di Sulawesi Selatan. Tahun 1995 industri kecil di Indonesia 190.767 sedangkan di Sulawesi Selatan 71.886 jadi prosentase mengalami penurunan sebesar 37,68% tapi absolutnya atau kualitasnya meningkat. Tahun 1996 industri kecil di Indonesia sebesar 228.978 sedang di Sulawesi Selatan sebesar 76.094 jadi industri kecil yang ada di Sulawesi Selatan untuk tahun ini sebesar 33,29% dan untuk tahun 1997 di Indonesia sebesar 241.169 dan di Sulawesi Selatan sebesar 77.062 jadi berkisar

31,95% industri kecil berada di Sulawesi Selatan dan 1998 jumlah industri kecil yang ada di Indonesia sebesar 263.226 sedangkan di Sulawesi Selatan sebesar 79.027 jadi untuk tahun 1998 jumlah industri kecil yang berada atau berkembang di Sulawesi Selatan sebesar 30,02 %.

Jumlah tersebut menunjukkan perkembangan yang cukup baik karena dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan meskipun dari segi prosentase menurun tapi dari jumlahnya atau kualitasnya terus mengalami peningkatan. Halaman ini tentunya mendukung banyaknya tenaga kerja yang dapat diserap.

### 3.3. Pengertian Produktivitas

Produktivitas merupakan hasil yang dicapai atau diperoleh atas usaha dalam jangka waktu tertentu, sedangkan menurut Payaman J. Simanjuntak mengatakan bahwa :

"Produktivitas merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai (output) dengan keseluruhan sumber daya (input) yang digunakan"<sup>13)</sup>

Defenisi menurut ILO (International Labour Organization) adalah :

"Produktivitas adalah rasio atau perbandingan antara elemen-elemen produksi tersebut berupa tanah kapital, buruh dan organisasi"<sup>14)</sup>

Pengertian lain dari produktivitas menurut DECD (organization for Economic Cooperation Development) bahwa :

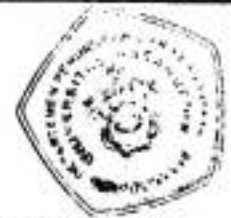
"Production is equal to output divided by one of it's production element"<sup>15)</sup>

Menurut OECD tersebut, pada dasarnya produktivitas adalah output dibagi dengan elemen produksi yang dimanfaatkan.

<sup>13)</sup> Payaman J. Simanjuntak, Op., Cit. Hal 30

<sup>14)</sup> Manulang K., Diklat Pengantar Produktivitas, Hal. 2 - 4.

<sup>15)</sup> Ibid, Hal 9.



Sesuai dengan laporan I Dewan Produktivitas Rasional 1993 dan merupakan pengertian secara filosofis bahwa :

"Produktivitas mengandung pengertian sikap mental yang selalu merupakan pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok harus lebih baik hari ini."<sup>16)</sup>

Pada umumnya patokan untuk mengukur produktivitas kerja adalah hasil dari setiap orang dalam suatu waktu tertentu. Namun untuk mencapai hasil yang maksimal, maka semua sarana dan prasarana yang tersedia berupa waktu, sumber daya manusia, dana, peralatan kerja dan sumber-sumber lainnya sedapat mungkin digunakan dengan baik, dengan demikian kemungkinan besar tujuan dapat tercapai serta output yang dihasilkan memenuhi standar mutu sesuai dengan target.

#### **3.4. Penggolongan Industri Menurut Bidang Usahanya**

Pola pengembangan dan pembinaan industri kecil merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan sebagai kebijakan manusia sebagai kebijakan manusia serta sumber daya produksi lainnya dari pemanfaatan secara optimal serta keterkaitan antara sektor industri dengan industri lainnya, maka Departemen Perindustrian Republik Indonesia, menggolongkan industri kecil menurut bidang usahanya berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 175/SK/1/1978 dan Peraturan Pelaksanaannya, antara lain industri kecil dapat dibagi menjadi 4 (empat) golongan yaitu :

1. Golongan industri kecil yang mempunyai kaitan dengan industri menengah dan besar.

---

<sup>16)</sup> Ibid, Hal 22



2. Golongan industri kecil yang berdiri sendiri dan menghasilkan produk-produk untuk konsumen akhir/langsung.
3. Golongan industri kecil sebagai penghasil barang-barang yang bercitra seni, yang umurnya untuk lingkungan pariwisata.
4. Golongan industri kecil yang berorientasi pada pasaran lokal yang bersifat pedesaan.

Sehubungan dengan penggolongan industri kecil tersebut, dan untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan penggolongan produk-produk yang lebih dari satu golongan, maka sangat perlu diberikan nomor klasifikasi industri menurut Internasional Standard of Industrial Clasification (ISIC) dimana standard ini dipergunakan oleh dunia internasional, juga Biro Pusat Statistik dan lembaga-lembaga lainnya, termasuk Departemen Perindustrian dengan menggunakan istilah Kelompok Lapangan Usaha Industri (KLUI). Adapun klasifikasi industri menurut ISIC dapat dilihat pada tabel VIII berikut ini dengan menggunakan 2 (dua) digit.

**TABEL VIII**  
**PENGGOLONGAN INDUSTRI MENURUT KODE INTERNATIONAL**  
**STANDARD OF INDUSTRIAL CLASIFICATION**  
**(ISIC), DENGAN 2 DIGIT**

Kode ISIC	Penggolongan Industri (Clasification Industrial)	Keterangan
3.1	Industri makanan, minuman dan tembakau	Klasifikasi produk menurut ISIC .
3.2	Industri tekstil dan pakaian jadi	
3.3	Industri kayu, barang-barang dari kayu termasuk perabot rumah tangga	1. Pertanian
3.4	Industri kertas dan barang-barang dari kertas termasuk percetakan dan penjilidan	2. Pertambangan energi
3.5	Industri kimia, minyak tanah dan batu bara, karet dan plastik	3. Industri
3.6	Industri barang galian, bahan logam kecuali minyak tanah dan batu bara	4. Listrik/Air minum
3.7	Industri dasar dan bahan-bahan logam	5. Bangunan
3.8	Industri barang-barang logam mesin dan perlengkapannya	6. Perdagangan, hotel dan restoran
3.9	Industri lain-lainnya	7. Angkutan/komunikasi
		8. Bank, lembaga keuangan lainnya
		9. Jasa-jasa

Sumber : Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wajo Tahun 1998.

### 3.5. Manfaat Pembangunan Industri Kecil

Kita ketahui bersama bahwa titik berat pembangunan ekonomi dengan sasaran yang diutamakan adalah untuk mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dan bidang industri serta terpenuhinya kebutuhan masyarakat banyak dan harus pula mampu membawa perubahan-perubahan fundamental dalam struktur ekonomi

sehingga produksi nasional yang bersumber dari luar sektor pertanian akan merupakan bagian yang semakin besar.

Dengan memperhatikan sasaran dari pembangunan dalam bidang ekonomi, salah satu sektor yang cukup menunjang di bidang ekonomi adalah industri. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan industri dapat meningkatkan pendapatan dan produksi disektor industri, yang tak lain diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri sehingga mengurangi ketergantungan terhadap impor dan diharapkan pula dapat memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja yang setiap tahunnya mendesak untuk memperoleh lapangan pekerjaan.

Mengingat pertambahan penduduk dari tahun ke tahun meningkat dengan terus menerus, menyebabkan pula bertambahnya tenaga kerja, dilain pihak kurangnya lapangan pekerjaan, sehingga akan menyebabkan bertambahnya pengangguran. Sehubungan dengan masalah tersebut di atas, perluasan kesempatan kerja mendapat penanganan yang lebih baik dalam pelaksanaan pembangunan yang sedang digalakkan sekarang ini dan di masa-masa yang akan datang. Oleh sebab itu perlu diambil suatu kebijaksanaan dan langkah-langkah perluasan lapangan kerja yang bersifat menyeluruh dan terpadu melalui pengarahannya investasi yang berorientasi pada perluasan lapangan kerja.

Salah satu langkah yang perlu diambil yaitu dengan mengembangkan industri kecil, dimana industri kecil merupakan industri yang padat karya sehingga memungkinkan untuk menyerap tenaga kerja. Dalam pengembangan industri kecil ini hanya pembangunannya yang harus ditingkatkan dan mampu mempercepat terciptanya lapangan kerja baru.

Selanjutnya apabila ditinjau dari segi ketenagakerjaan, maka industri kecil mempunyai kelebihan-kelebihan antara lain :

**A. Dari Segi Makro**

1. Industri kecil merupakan lapangan kerja bagi tenaga kerja musiman untuk meningkatkan pendapatnya.
2. Memberikan kesempatan kerja bagi anak-anak muda yang putus sekolah dan yang tidak mempunyai pengalaman kerja selain sektor pertanian utamanya tenaga kerja kasar.
3. Industri kecil merupakan tempat pendidikan dan latihan bagi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh industri-industri besar.
4. Industri kecil memiliki potensi untuk menjadi industri besar.
5. Industri kecil yang tumbuh di desa-desa dapat mencegah terjadinya perpindahan dari desa ke kota besar (urbanisasi) dengan segala efeknya.

**B. Dari Segi Mikro**

1. Personil relatif kecil, sehingga hubungan antara pimpinan dan karyawan sangat baik.
2. Tenaga kerja yang dilibatkan dari kalangan keluarga sendiri atau sedaerah, sehingga mempunyai cita-cita dan kepentingan yang sama.
3. Tidak terlalu membutuhkan tenaga kerja spesialis yang terlalu tinggi artinya keahlian dapat diperoleh setelah bekerja sambil belajar.

Dari segi ekonomi, industri kecil memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut :

1. Modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar.
2. Tidak membutuhkan teknologi yang terlalu besar harganya.

3. Tidak terlalu lama membutuhkan waktu, yaitu mulai dari penanaman modal sampai adanya hasil produksi.
4. Produksi secara langsung melayani masyarakat umumnya terletak pada sumber bahan baku.
5. Sanggup melayani permintaan konsumen dan menyesuaikan diri dengan pola permintaan pasar, serta sanggup melayani pesanan dari industri-industri besar.
6. Tidak terlalu banyak mengandung resiko terhadap kerusakan mesin dan tidak membutuhkan devisa.
7. Jumlah tenaga kerja yang membutuhkan relatif sedikit.

Selanjutnya dikatakan oleh R.B.Suhartono bahwa strategi industrialisasi harus memberikan arah perkembangan industri agar terbentuk suatu struktur industri yang makin tangguh. Demikian halnya dengan industri kecil yang termasuk didalamnya industri kerajinan rumah tangga, merupakan bagian dari industrialisasi haruslah diarahkan langsung pada pemecahan masalah pemerataan. Industrialisasi haruslah diarahkan langsung pada masalah pemerataan. Industrialisasi yang tidak mempunyai dampak langsung mengurangi kemiskinan bukanlah strategi yang baik.

Untuk itulah kebijaksanaan industrialisasi harus terutama diarahkan pada pengembangan industri kecil dan kerajinan rumah tangga, khususnya di desa dengan memprioritaskan penggunaan barang-barang lokal serta teknologi sederhana. Industri-industri kecil tersebut harus dikembangkan untuk dapat berorientasi kepada pasar yang lebih luas (dari pasar lokal ke pasar regional).

kemudian kepada pasar dengan lingkup nasional, dan lebih baik jika dapat menjangkau pasar internasional.<sup>17)</sup>

Agar dapat menjangkau seperti yang telah disebutkan di atas, maka keterkaitan dengan sektor industri besar dan menengah dengan sektor-sektor lain jelas perlu dikembangkan, sehingga nantinya dapat memperluas dan meningkatkan potensi pertumbuhan pasar bagi hasil-hasil industri kecil serta bisa menjadi sumber kemajuan dan inovasi dalam cara memproduksi. Strategi industri kecil harus pula dilandaskan pada program pengembangan teknologi tepat guna yang dapat menciptakan kesempatan kerja, sekaligus dapat meningkatkan keterampilan dan produktifitas kerja.

---

<sup>17)</sup> R B Suhartono, Pola dan Struktur Industri Indonesia, Cetakan I, Jakarta, CSIS, 1982, Hal. 12.

## BAB IV PEMBAHASAN

### 4.1. Perkembangan Penduduk

Perkembangan dan pertumbuhan penduduk merupakan masalah yang sangat penting dan kompleks bagi setiap daerah. Perkembangan penduduk dalam arti peningkatan jumlah penduduk sebagai salah satu sumber daya ekonomi, merupakan potensi ekonomi kontradiktif, oleh karena disatu pihak sumber-daya manusia tersebut dapat dijadikan sebagai modal pembangunan, akan tetapi dilain pihak dapat merupakan beban yang justru dapat menghambat upaya pencapaian keberhasilan pembangunan, khususnya dilihat dari sisi pembangunan ekonomi.

Sebaliknya apabila pertumbuhan penduduk itu tidak terkendalikan dan menyebar tidak merata, maka dapat dipastikan bahwa pengalokasiannya untuk dapat berfungsi sebagai modal dasar untuk pembangunan dengan maksud bahwa tenaga kerja yang produktif akan terhalang bahkan dapat memperbesar tingkat pengangguran. Maka penambahan penduduk tersebut akan merupakan beban pembangunan, karena adanya ketidak seimbangan antara jumlah penduduk dengan sumber-sumber kebutuhan hidup yang pokok bagi penduduk itu sendiri, seperti : sandang, pangan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan serta masih terbatasnya lapangan kerja dan sebagainya.

Ilustrasi dari perkembangan penduduk terhadap pembangunan ekonomi telah pula dikemukakan oleh Sadono Sukirno, mengatakan bahwa :

\*Di negara-negara sedang berkembang (UDC = Under Development Country), penduduk lebih merupakan penghambat kepada pembangunan ekonomi. Ciri-ciri negara sedang berkembang adalah perkembangan penduduk

menimbulkan lebih banyak akibat-akibat negatif terhadap pembangunan, pengangguran yang jumlahnya sudah berlebihan, tingkat pendapatan perkapita yang rendah, jaringan pengangkutan yang masih belum sempurna, terdapatnya kekurangan tenaga terdidik dan usahawan, dan masih tetap terbatasnya dana untuk penanaman modal merupakan ciri penting negara-negara sedang berkembang yang menyebabkan pertambahan penduduk lebih merupakan pada pembangunan ekonomi.<sup>18)</sup>

Berkenaan dengan keadaan tersebut, maka perkembangan penduduk yang tidak terkendali benar-benar merupakan problem yang cukup kompleks dalam usaha pembangunan. Oleh karena pertumbuhan penduduk dengan laju yang tinggi bukan saja mengakibatkan semakin bertambahnya tenaga kerja, akan tetapi juga akan berakibat semakin terbatasnya kesempatan memperoleh lapangan kerja yang pada akhirnya penduduk bukan lagi dikatakan sebagai modal dasar pembangunan tetapi justru menghambat pembangunan.

Melihat lebih lanjut tentang masalah perkembangan penduduk, maka ada tiga komponen utama yang menentukan pertumbuhannya yaitu kelahiran, kematian dan migrasi. Selisih antara banyaknya kelahiran diatas kematian untuk satu jangka waktu tertentu misalnya setahun merupakan pertumbuhan penduduk secara alami, sedang migrasi dapat pula menambah atau mengurangi penduduk disuatu daerah tertentu. Ketiga komponen tersebut merupakan faktor yang menentukan besar kecilnya dalam arti jumlah penduduk disuatu daerah tertentu. Penduduk akan bertambah jumlahnya apabila tingkat kelahiran lebih besar dari tingkat kematian setelah dikurangi dengan emigrasi dan ditambah dengan imigrasi.

Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa selama jangka waktu lima tahun terjadi kenaikan atau pertambahan penduduk di Kabupaten Wajo, yaitu sebanyak

---

<sup>18)</sup> Sadono Sukirno. *Ekonomi Pembangunan*. Penerbit Bortagorat, Medan, 1996, Hal. 112.





9.832 jiwa atau dari 396.043 jiwa pada tahun 1994 menjadi 405.875 jiwa pada tahun 1998. Untuk lebih jelasnya data tentang jumlah penduduk, perkembangannya dan perkembangan realtifnya dalam tahun 1994-1998 di Kabupaten Wajo dapat dilihat dari tabel IX, hal. 35.

Pada tabel terlihat dari tahun 1994-1995 terjadi penambahan penduduk sebanyak 5.866 jiwa atau perkembangan relatifnya sebesar 1,48%. Selanjutnya pada tahun berikutnya terjadi penambahan sebesar 1.240 jiwa dengan perkembangan relatifnya 0,31% yang berarti menurun dari tahun sebelumnya. Pada tahun 1997 terjadi penambahan penduduk sebanyak 609 jiwa dengan perkembangan relatifnya sebesar 0,15% yang berarti mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Dan tahun 1998 penambahan penduduknya meningkat sebesar 2.117 jiwa dengan perkembangan relatifnya 0,52%. Secara keseluruhan perkembangan penduduk selama kurun waktu lima tahun tersebut adalah rata-rata bertambah sebesar 2.458 jiwa atau perkembangan relatifnya sebesar 0,61% setiap tahunnya.

Melihat perkembangan penduduk Kabupaten Wajo selama kurun waktu lima tahun selama periode 1994-1998 hanya mengalami peningkatan sebesar rata-rata 0,61% setiap tahunnya. Prosentase ini merupakan tingkat yang wajar dibanding luas Kabupaten Wajo yang terdiri atas 14 kecamatan. Rata-rata penambahan yang sebesar 2.458 jiwa tersebut tentunya memberikan dampak pada peningkatan jumlah tenaga kerja. Akan tetapi peningkatan penduduk tidak langsung berbanding lurus dengan jumlah tenaga kerja. Hal ini disebabkan oleh penetapan golongan tenaga

kerja dimulai umur 18 (Delapan belas) tahun sementara untuk jumlah penduduk dimulai sejak lahir.

Sementara itu, peningkatan penduduk di Sulawesi Selatan selama kurun waktu yang sama sebanyak 134.692 jiwa dengan prosentase 1,80% per tahunnya. Jadi, jika dibanding dengan pertambahan penduduk di Sulawesi Selatan, pertambahan penduduk Kabupaten Wajo dinilai dibawah rata-rata. Rata-rata pertambahan penduduk di setiap kabupaten di Sulawesi Selatan sebesar 5.856 jiwa sementara di Kabupaten Wajo hanya sebesar 2.458 jiwa yang merupakan setengah bagian dari rata-rata pertambahan penduduk di Sulawesi Selatan.

TABEL IX  
PERKEMBANGAN PENDUDUK DI KABUPATEN WAJO  
TAHUN 1994-1998

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Perkembangan	
		Absolut (jiwa)	Relatif (%)
1994	396.043	-	-
1995	401.909	5.866	1,48
1996	403.149	1.240	0,31
1997	403.758	609	0,15
1998	405.875	2.117	0,52

Sumber : BPS, Kabupaten Wajo.

Dalam penyebaran penduduk di setiap wilayah kecamatan tentunya berbeda, hal tersebut disebabkan oleh situasi dan keadaan wilayahnya. Untuk mengetahui perincian jumlah penduduk pada setiap kecamatan dapat ditelusuri dari penyajian tabel di bawah ini.

**TABEL X**  
**JUMLAH DAN KEPADATAN PENDUDUK**  
**PER KECAMATAN DI KABUPATEN WAJO**  
**TAHUN 1994-1998**

No.	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Distribusi L (%)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	Keterangan
1.	Sabbangparu	132,75	5,30	31.607	238	$L = \frac{K}{TK} \times 100\%$ K = Luas per-Kecamatan TK= Luas Kabupaten Wajo
2.	Tempe	38,27	1,53	51.451	344	
3.	Pamma	162,10	6,47	39.106	241	
4.	Takkalala	179,76	7,17	26.226	146	
5.	Sajoanging	167,01	6,66	19.902	119	
6.	Majauleng	225,92	9,01	35.241	156	
7.	Tanasitolo	154,60	6,17	38.042	246	
8.	Belawa	172,30	6,87	34.713	201	
9.	Maniangpajo	175,96	7,02	14.789	84	
10.	Pitumpanua	207,13	8,27	38.432	186	
11.	Perw.bola	220,13	8,78	22.120	100	
12.	Perw.penrang	154,90	6,18	19.851	128	
13.	Perw.gilirang	147,00	5,87	13.173	90	
14.	Perw.keera	368,36	14,70	21.222	57	
	Jumlah	2.506,19	100,00	405.875	162	

Sumber : BPS, Kabupaten Wajo Tahun 1998

Nampak pada tabel tersebut, bahwa penyebaran penduduk pada setiap kecamatan di kabupaten Wajo adalah hampir merata kecuali pada kecamatan Tempe yang merupakan wilayah yang cukup padat penduduknya, hal ini dapat ditelusuri dari luas wilayahnya yang relatif kecil dibanding dengan luas kecamatan lainnya yang relatif cukup luas. Dan nampaknya penyebab dari kepadatan penduduk dalam wilayah kecamatan termaksud, adalah letaknya yang cukup bahkan sangat strategis di pusat kota. Sedang wilayah kecamatan yang relatif kurang padat penduduknya di sekitar pinggiran kota. Sehingga dengan keadaan tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sementara bahwa dengan luas sebesar 2.506,19 km<sup>2</sup> Kabupaten Wajo pada tahun 1998 telah dihuni sebanyak 405.875 jiwa penduduk

dengan rata-rata kepadatan penduduk per km<sup>2</sup> adalah sebanyak 162 jiwa pada pengamatan yang sama.

Kepadatan penduduk Kabupaten Wajo dengan jumlah 405.875 jiwa penduduk dengan luas 2.506,19 km<sup>2</sup> tersebut merupakan kondisi kepadatan yang wajar. Oleh karena pemerataan penduduknya yang kurang merata di setiap kecamatan menyebabkan adanya beberapa bagian daerah yang mengalami tingkat kepadatan yang relatif padat, khususnya di daerah perkotaan yang merupakan sentra bisnis kabupaten Wajo

#### 4.2. Perkembangan Tenaga Kerja

Dengan berdasarkan pengertian tenaga kerja pada bab III terdahulu, maka dapatlah disimpulkan bahwa bilamana seseorang atau penduduk sudah berada pada kelompok umur 18 tahun ke atas, maka dengan mudah kita dapat ketahui besarnya jumlah tenaga kerja yang ada di Kabupaten Wajo dari tahun ke tahun seperti yang nampak pada tabel XI hal. 39, yaitu jumlah penduduk Kabupaten Wajo menurut kelompok umur.

Berdasarkan tabel XI, hal. 39, tersebut serta pengertian dari tenaga kerja yang ditinjau dari segi demografis, maka penulis dapat membuat lagi satu tabel yaitu tabel XII, hal. 41 mengenai jumlah tenaga kerja di Kabupaten Wajo pada tahun 1994-1998 yang nantinya akan disajikan pada halaman berikut. Dengan melihat tabel XII hal. 41 tersebut kemudian melihat jumlah penduduk secara keseluruhan seperti pada tabel XI hal. 38 maka terlihat bahwa pada tahun 1994 jumlah tenaga kerja tercatat sebesar 257.029 orang, dari jumlah penduduk sebesar 396.043 jiwa, pada tahun 1995 dari penduduk sebesar 401.909 orang, maka tercatat tenaga kerja sebanyak

260.926 orang, berarti mengalami perkembangan sebesar 3.897 orang atau 1,52% pada tahun 1996 jumlah tenaga kerja telah meningkat lagi menjadi 261.724 orang dari penduduk sebanyak 403.149 jiwa atau mengalami perkembangan sebesar 798 orang tenaga kerja atau dengan prosentase 0,30%. Setelah itu pada tahun 1997 dari penduduk yang tercatat sebanyak 403.758 jiwa, maka tercatat tenaga kerja sebanyak 280.943 orang tenaga kerja, berarti terjadi pertambahan jumlah tenaga kerja sebanyak 19.219 atau 7,34%, sedang pada tahun 1998 dari penduduk sebesar 405.875 jiwa tercatat tenaga kerja sebanyak 282.427 orang, ini berarti bertambah lagi sebanyak 1.484 atau sebesar 0,52%. Hal ini menunjukkan bahwa sejak tahun 1994 hingga tahun 1998 jumlah tenaga kerja di Kabupaten Wajo mengalami perkembangan sebanyak 968.835 orang tenaga kerja.

**TABEL XI**  
**PENDUDUK KABUPATEN WAJO MENURUT KELOMPOK UMUR**  
**TAHUN 1994-1998**

Kelompok Umur	Tahun 1994	Tahun 1995	Tahun 1996	Tahun 1997	Tahun 1998
0 - 4	41.345	41.9935	42.067	35.800	35.985
5 - 9	50.430	51.143	51.303	43.614	43.839
10 - 14	47.239	47.905	48.055	43.401	43.624
15 - 19	42.658	43.287	43.420	42.625	42.846
20 - 24	36.093	36.659	36.770	36.184	36.376
25 - 29	34.286	34.831	34.936	34.504	34.688
30 - 34	30.236	30.697	30.791	30.710	30.872
35 - 39	26.410	26.803	26.885	28.664	28.814
40 - 44	23.398	23.748	23.821	24.968	25.100
45 - 49	18.883	19.163	19.223	21.9155	22.030
50 - 54	14.799	15.018	15.064	18.636	18.735
55 - 59	10.163	10.310	10.342	14.870	14.949
60 - 64	8.7522	8.885	8.912	13.568	13.641
65+	11.351	11.525	11.560	14.299	14.376

Sumber : BPS Kabupaten Wajo Tahun 1998.

Bila dilihat tenaga kerja berdasarkan tabel XI di atas menurut kelompok umur, maka jumlah tenaga kerja yang paling menonjol dari segi jumlahnya pada kelompok umur 15 – 19 tahun kemudian kelompok umur 20 – 24 tahun. Ini berarti tenaga kerja yang ada di Kabupaten Wajo pada umumnya bertumpuk pada kelompok umur muda. Susunan umur penduduk ini pada dasarnya jika dilihat dari penyediaan tenaga kerja ada tiga golongan yaitu :

1. Penduduk golongan muda usia atau anak-anak.
2. Penduduk golongan dewasa atau tenaga kerja produktif.
3. Penduduk golongan lanjut usia.

Melihat kondisi kabupaten Wajo dari susunan umur penduduk cukup baik, dilihat dari jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibanding dengan usia anak-anak dan usia lanjut, jika usia tidak produktif lebih besar dibanding dengan usia produktif maka ini akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi karena mereka menjadi beban bagi tenaga tenaga yang produktif dan hidup mereka terpaksa tergantung pada tenaga kerja produktif ini tidak menguntungkan dari segi ekonomi karena golongan usia ini cenderung untuk menurunkan tingkat penghasilan per kapita dan mereka semua merupakan konsumen dan bukannya sebagai produsen dalam perekonomian tersebut dan penduduk yang usia tidak produktif ini, jika jumlahnya sangat besar juga mengakibatkan alokasi faktor-faktor produktif ke arah investasi. Investasi sosial dan bukan pada investasi produktif oleh karena itu akan menunda perkembangan ekonomi.

**TABEL XII**  
**JUMLAH TENAGA KERJA DI KABUPATEN WAJO**  
**TAHUN 1994-1998**

Tahun	Jumlah Tenaga Kerja (orang/jiwa)	Perkembangan	
		Jumlah	Prosentase (%)
1994	257.029	-	-
1995	260.296	3.897	1,52
1996	261.724	798	0,30
1997	280.943	19.219	7,34
1998	282.427	1.484	0,52

Sumber : BPS, Kabupaten Wajo Tahun 1998

Data : Diolah Penulis

Berdasarkan data diatas, jumlah tenaga kerja di Kabupaten Wajo terus mengalami peningkatan setiap tahunnya selama periode tahun 1994-1998. Akan tetapi perkembangan yang terjadi tidak meningkat secara konstan, kadang dalam jumlah besar dan kadang dalam jumlah kecil. Demikian pula halnya jika dihubungkan dengan jumlah tenaga kerja di Sulawesi Selatan secara umum. Di tahun 1998, di Sulawesi Selatan terdapat 6.162.244 rata – rata untuk 23 kabupaten yang ada sebesar 267.923 jiwa sementara itu di Kabupaten Wajo ada 282.427. Dari data tersebut, jelas menunjukkan bahwa tenaga kerja di Kabupaten Wajo lebih besar dari daerah lain. Oleh karena itu diperlukan adanya peningkatan lapangan kerja untuk dapat menampung tenaga kerja yang besar itu.

Namun jika ditinjau lebih dalam lagi tentang pengertian tenaga kerja maka tidak semua penduduk usia kerja tersebut ada dalam angkatan kerja.

Yang dimaksud dengan angkatan kerja secara umum adalah mereka yang sedang bekerja ingin bekerja, dan sedang aktif mencari pekerjaan. Sedang penduduk usia kerja yang tidak tergolong sebagai angkatan kerja umumnya adalah

yang masih sekolah, orang yang sudah pensiun, yang cacat dan selebihnya sebagai penganggur.

Menurut Biro Pusat Statistik, yang dimaksud dengan angkatan kerja dalam sensus penduduk tahun 1998 adalah : penduduk yang berumur 18 tahun ke atas yang selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab, dan mereka mencari pekerjaan sedangkan yang tidak termasuk angkatan kerja, adalah mereka yang masih sekolah dan tidak bekerja, serta wanita yang mengurus rumah tangga, pensiunan dan mereka yang berusia lanjut karena keadaan fisiknya yang tidak kuat bekerja serta tidak mencari pekerjaan.

Dengan melihat pengertian di atas, maka antara tenaga kerja dan angkatan kerja mempunyai pengertian yang berbeda. Namun di Indonesia masih terdapat bermacam-macam pengertian dan tafsiran tentang kedua hal tersebut di atas. Ada yang berpendapat bahwa pengertian tenaga kerja itu adalah sama artinya dengan angkatan kerja, yang mana kedua istilah ini sebenarnya adalah terjemahan dari bahasa Inggris " Man Power" untuk tenaga kerja dan "Labour Force" untuk angkatan kerja.

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara yang dinyatakan bahawa, masalah kependudukan merupakan masalah yang penting dan jangka panjang, dimana pemecahannya memerlukan waktu yang lama. Pertambahan penduduk berkaitan langsung dengan angkatan kerja. sedang pertambahan penduduk akan memerlukan penyediaan lapangan kerja. Dalam penyediaan lapangan kerja, tidak saja investasi yang dibutuhkan, tetapi situasi politik dalam negeri yang stabil, hubungan



internasional yang baik serta partisipasi masyarakat sebagai subyek pembangunan mutlak dipergunakan.

Dalam penyediaan lapangan kerja, kadang-kadang sering terjadi ketidakseimbangan antara yang dibutuhkan dengan yang disediakan. Yang dibutuhkan jauh lebih tinggi dari pada yang disediakan, terlebih lagi lapangan pekerjaan yang sesuai dan memadai.

Dengan demikian akan timbul ketimpangan-ketimpangan atau kepincangan-kepincangan yang disebabkan antara laju pertumbuhan kesempatan kerja di satu pihak dengan laju pertumbuhan angkatan kerja di lain pihak. Akibatnya muncul pengangguran, dimana mereka belum memperoleh lapangan kerja.

Perkembangan angkatan kerja mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sesuai dengan perkembangan tenaga kerja. Untuk mengetahui jumlah angkatan kerja di Kabupaten Wajo pada tahun 1994-1998, maka penulis akan menyajikan pada tabel XIII berikut ini :

**TABEL XIII**  
**PERKEMBANGAN ANGKATAN KERJA DI KABUPATEN WAJO**  
**TAHUN 1994-1998**

Tahun	Jumlah Angkatan Kerja (orang/jiwa)	Perkembangan	
		Jumlah	Prosentase (%)
1994	139.257	-	-
1995	146.328	7.071	5,07
1996	149.852	3.524	2,40
1997	156.341	6.489	4,33
1998	160.604	4.263	2,72

Sumber : Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Wajo

Dari tabel di atas tampak bahwa pada tahun 1994 jumlah angkatan kerja sebesar 139.257 orang meningkat menjadi 146.328 orang pada tahun 1995 ini

menunjukkan adanya pertambahan sebanyak 7.701 orang atau 5,07% tahun 1996 jumlah angkatan kerja berjumlah 149.852 orang bertambah sebesar 3.524 orang atau 2,40%. Kemudian pada tahun 1997, angkatan kerja berjumlah 156.341 orang, perkembangannya sebesar 6.489 orang atau 4,33% pada tahun 1998 jumlah angkatan kerja sebanyak 160.604 orang, perkembangannya sebanyak 4.263 atau sebesar 2,72%. Secara keseluruhan perkembangan jumlah angkatan kerja setiap tahunnya meningkat rata-rata 3,63%.

Angka peningkatan rata-rata jumlah angkatan kerja tersebut merupakan angka yang cukup besar dan berpengaruh langsung terhadap jumlah tenaga kerja. Karena dan pengertian angkatan kerja itu sendiri. Angkatan kerja merupakan golongan tenaga kerja yang belum berkesempatan untuk bekerja dan berpenghasilan. Seperti halnya dengan seorang yang baru menyelesaikan studinya dan belum mendapat kesempatan kerja, sementara usia tentunya sudah termasuk dalam kategori tenaga kerja.

Sementara itu, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Wajo merupakan suatu angka yang dapat dikategorikan besar untuk wilayah Sulawesi Selatan. Prosentase jumlah angkatan kerja rata-rata tiap daerah sebesar 4,35% sementara Kabupaten Wajo memiliki 7,6%. Nilai tersebut dikategorikan besar karena melebihi angka rata-rata yang seharusnya.

#### 4.3. Kesempatan Kerja

Pertambahan jumlah penduduk setiap tahun mengalami peningkatan utamanya pada jumlah penduduk usia kerja. Hal ini akan berdampak buruk pada ketenagakerjaan. Jika tidak diimbangi dengan perluasan lapangan kerja secara



menyeluruh di semua sektor, ini akan berakibat tingkat pengangguran akan semakin besar.

Tidak dapat dipungkiri bahwa di setiap daerah pasti terdapat sekelompok penduduk yang tidak mendapat kesempatan untuk bekerja, baik yang nyata maupun dalam bentuk terselubung. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya keseimbangan antara jumlah tenaga kerja yang ada dengan lapangan pekerjaan yang tersedia yang dapat menampung mereka. Peningkatan jumlah tenaga kerja tersebut tidak dapat dipisahkan dari pertambahan jumlah penduduk yang tidak terkendali. Jadi peningkatan jumlah pengangguran dipengaruhi oleh pertambahan jumlah penduduk dan tidak terdapatnya kesempatan kerja yang luas bagi seluruh tenaga kerja yang berbeda.

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan kebijaksanaan pembangunan dan perluasan kesempatan kerja yang mengutamakan usaha-usaha yang dapat menanggulangi pengangguran dan memberantas kemiskinan. Selain itu perluasan sarana pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan perlu dilaksanakan agar jumlah tenaga kerja pada usia sekolah dapat kembali memasuki sekolah sehingga memperkecil jumlah tenaga kerja usia sekolah dalam pasaran kerja. Atau dengan kata lain pengangguran dapat diperkecil.

Untuk itu kebijaksanaan dalam menanggulangi pengangguran dapat ditempuh dalam beberapa seperti :

1. Perluasan kesempatan kerja
2. Perluasan sarana pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan

Sementara itu kebijaksanaan dalam perluasan kesempatan kerja menurut Sumitro Djojohadikusumo dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu :

1. Pengembangan industri, terutama industri yang bersifat padat karya (labour intensive) yang dapat menyerap relatif banyak tenaga kerja dalam proses produksinya, dan
2. Melalui berbagai proyek pekerjaan umum seperti pembuatan jalan, bendungan, jembatan dan sebagainya.<sup>19)</sup>

Sedang perluasan sarana pendidikan menurut beliau, ialah memperbesar jumlah murid pada usia sekolah dan usaha ini dapat dicapai dua tujuan yaitu :

1. Memperkecil jumlah tenaga kerja pada usia sekolah yang memasuki pasaran tenaga kerja.
2. Peningkatan mutu tenaga kerja melalui pendidikan dan latihan kependidikan.<sup>20)</sup>

Perluasan kesempatan kerja secara produktif tidak berarti hanya penciptaan lapangan kerja baru, melainkan pula peningkatan produktivitas kerja pada umumnya, disertai pemberian upah yang sepadan dengan apa yang dikerjakan oleh pekerja tersebut, agar upah yang diterima dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi rumah tangga keluarganya.

Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sumitro Djojohadikusumo dalam hal perluasan kesempatan kerja, maka pembangunan industri-industri kecil yang merupakan industri padat karya perlu digalakkan di seluruh wilayah tanah air.

---

<sup>19)</sup> Sumitro Djojohadikusumo, Indonesia Dalam Perkembangan Dunia Kini dan Masa Akan Datang, Lembaga Pendidikan dan Penerangan Sosial, Jakarta, 1984, Hal. 34.

<sup>20)</sup> Sumitro Djojohadikusumo, Masalah Penduduk dan Kesempatan Kerja Dalam Prospektif Jangka Panjang, Prasaran Menteri Negeri Riset Untuk Seminar Nasional Tentang : Kependudukan dan Tenaga Kerja, Jakarta, 1977, Hal. 11.

sehingga nantinya dapat menyerap tenaga kerja. Untuk melihat bagaimana perkembangan kesempatan kerja di Kabupaten Wajo terlebih dahulu kita lihat bagaimana perkembangan unit usaha industri kecil, yang mengalami perkembangan setiap tahunnya sebesar 0,72% (lihat tabel XIV, hal. 46). Perkembangan ini merupakan peningkatan yang sangat kecil jika dibandingkan dengan peningkatan tenaga kerja yang mencapai 1,75% per tahun. Sementara itu, industri kecil yang hanya mampu menyerap sedikit dari jumlah tenaga kerja yang ada. Oleh karena itu, diperlukan kebijaksanaan-kebijaksanaan baru yang dapat meningkatkan jumlah industri kecil maupun usaha-usaha yang mengarah kepada peningkatan pola pikir masyarakat khususnya para tenaga kerja agar dapat menciptakan lapangan kerja sendiri yang tidak menutup kemungkinan dapat menyerap tenaga kerja lainnya. Hal tersebut dapat menciptakan kesempatan kerja yang luas bagi para tenaga kerja.

#### **4.4. Keadaan Perkembangan Industri Kecil**

Industri kecil merupakan usaha ekonomi yang tersebar luas di Indonesia, sebagian besar dilakukan oleh golongan ekonomi lemah. Oleh karenanya industri kecil dalam pembangunan nasional dititikberatkan untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat golongan ekonomi lemah.

Dalam pembangunan industri kecil terus diupayakan agar dapat tercipta kaitan erat dengan industri menengah dengan industri besar, sehingga pengembangan industri besar dan menengah secara langsung merangsang pembangunan industri kecil, yang pada gilirannya akan menunjang terwujudnya pendalaman dan pematangan struktur industri nasional.

Perkembangan industri kecil ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya berapa besar investasi yang akan digunakan, berapa jumlah unit usaha, berapa besar tenaga kerja yang dipekerjakan serta berapa besar produksi yang dihasilkan.

Untuk itu pada pembahasan ini penulis akan memaparkan keadaan industri kecil di Kabupaten Wajo dilihat dari beberapa faktor di atas. Untuk mengetahui apakah industri kecil tersebut mengalami perkembangan atau sebaliknya.

#### 4.4.1. Jumlah Unit Usaha

Keadaan perkembangan industri kecil dilihat dari jumlah unit usaha mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**TABEL XIV**  
**PERKEMBANGAN UNIT USAHA PADA INDUSTRI KECIL**  
**DI KABUPATEN WAJO**  
**TAHUN 1994-1998**

Tahun	Jumlah Unit Usaha	Perkembangan (%)
1994	9.828	-
1995	9.908	0,81
1996	9.948	0,40
1997	10.034	0,86
1998	10.118	0,84

Sumber : Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wajo  
Data : Diolah Penulis

Pada tabel tersebut nampak bahwa jumlah industri kecil yang ada di Kabupaten Wajo pada tahun 1994 adalah 9.828 unit usaha meningkat menjadi 9.908 pada tahun 1995, berarti ada kenaikan sebesar 0,81%. Selanjutnya tahun 1996 berjumlah 9.948 unit usaha artinya meningkat sebesar 0,40%. Untuk tahun 1997 meningkat menjadi 10.034 unit usaha berarti ada perkembangan sebesar 0,86%.

Sedangkan tahun 1998 menunjukkan peningkatan menjadi 10.118 unit usaha berarti meningkat sebanyak 84 unit usaha atau sebesar 0,84%. Bila lihat secara keseluruhan, maka perkembangan jumlah unit usaha selama kurun waktu lima tahun adalah rata-rata bertambah sebesar 0,72% setiap tahunnya.

#### 4.4.2 Jumlah Tenaga Kerja

Keadan industri di Kabupaten Wajo dari segi penerapan tenaga kerja dari tahun 1994-1998 menunjukkan adanya perkembangan. Keadaan ini tentunya yang diharapkan oleh pemerintah di dalam usaha penciptaan kesempatan kerja dan mengatasi masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Wajo.

Adapun perkembangan tenaga kerja pada subsektor industri kecil dari tahun 1994-1998 akan penulis sajikan pada tabel berikut ini :

**TABEL XV**  
**PERKEMBANGAN TENAGA KERJA PADA INDUSTRI KECIL**  
**DI KABUPATEN WAJO**  
**TAHUN 1994-1998**

Tahun	Jumlah Unit Usaha	Perkembangan (%)
1994	26.747	-
1995	27.118	1,38
1996	27.258	0,51
1997	27.519	0,95
1998	27.858	1,23

Sumber : Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wajo

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa pada tahun 1994 jumlah tenaga kerja yang bekerja pada industri kecil adalah 26.747 orang, kemudian pada tahun 1995 meningkat menjadi 27.118 orang atau naik sebesar 1,38%. Pada tahun 1996 jumlah

tenaga kerja yang ada di sektor industri kecil meningkat menjadi 27.258 orang atau mengalami kenaikan sebesar 0,51%. Untuk tahun 1997 masih tetap memperlihatkan kenaikan sebesar 0,95%, atau sebanyak 27.519 orang. Dan tahun 1998 tenaga kerja yang diserap meningkat menjadi 27.858 orang atau berkembang sebesar 1,23%. Secara keseluruhan perkembangan jumlah tenaga kerja setiap tahunnya meningkat rata-rata 1,01%.

Peningkatan rata-rata jumlah tenaga kerja di subsektor industri kecil di nilai besar jika kita bandingkan dengan pertambahan jumlah unit usaha industri kecil yang hanya mencapai 0,72%. Oleh karena itu, tenaga kerja yang tidak terserap oleh industri kecil diserap oleh subsektor yang lain serta pada sektor kegiatan yang lain. Akan tetapi, tidak semua tenaga kerja yang ada dapat ditampung oleh sektor-sektor tersebut. Jadi ada yang tidak mendapat kesempatan untuk bekerja.

Untuk penanggulangan dampak membengkak tenaga kerja yang tidak terserap tersebut, maka langkah yang sangat efisien yang harus diambil adalah pemberdayaan tenaga kerja tersebut melalui pelatihan-pelatihan sehingga dapat menciptakan industri-industri kecil yang nantinya dapat menyerap tenaga-tenaga kerja yang semakin meningkat jumlahnya. Jadi dalam hal ini industri kecil yang harus dikembangkan untuk dapat mengatasi masalah ketenagakerjaan.

#### 4.4.3. Nilai Investasi

Dalam mengusahakan perkembangan suatu kegiatan usaha apapun bentuknya utamanya yang menyangkut di bidang ekonomi, maka salah satu faktor pendukung yang sangat penting di dalam pengelolaan usaha tersebut adalah faktor modal.



Investasi adalah modal yang dimiliki suatu perusahaan dalam menjalankan suatu usaha, tanpa investasi tersebut suatu usaha tidak dapat berjalan lancar.

Olehnya itu pemerintah dewasa ini dalam pemberian kredit kepada pengusaha, lebih memprioritaskan kepada pengusaha ekonomi lemah dan mengefektifkan lembaga-lembaga perkreditan di samping lembaga ekonomi lainnya seperti Koperasi Unit Desa (KUD) dengan tujuan membantu para pengusaha ekonomi lemah dibidang permodalan dan pemasaran hasil-hasil produksi, sehingga dengan adanya sarana pembantu itu serta dukungan yang kuat, maka industri-industri kecil diharapkan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Utamanya di daerah pedesaan.

Dalam pembinaan dan pengembangan industri kecil di Kabupaten Wajo terlihat pula adanya peningkatan jumlah investasi setiap tahunnya seperti yang terjadi pada unit usaha dan tenaga kerja.

Untuk mengetahui perkembangan investasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL XVI**  
**PERKEMBANGAN JUMLAH INVESTASI PADA**  
**INDUSTRI KECIL DI KABUPATEN WAJO**  
**TAHUN 1994-1998**

Tahun	Nilai Investasi (Rp 000)	Perkembangan (%)
1994	5.068.164	-
1995	5.999.728	18,38
1996	6.510.950	8,52
1997	6.684.667	2,66
198	7.532.654	12,68

Sumber : Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wajo  
Data : Diolah Penulis

Pada tabel tersebut menunjukkan jumlah investasi pada subsektor industri kecil mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Tahun 1994 jumlah investasi sebesar Rp. 5.068.164.000,- kemudian pada tahun 1995 naik menjadi Rp. 5.99.728.000,- artinya berkembang sebesar 18,38%. Untuk tahun 1996 meningkat menjadi Rp. 6.510.950.000,- berarti mengalami perkembangan sebesar 8,52% dari tahun sebelumnya. Tahun 1997 naik menjadi Rp. 6.684.667.000,- artinya tetap mengalami perkembangan sebesar 2,66% sedangkan tahun 1998 sebanyak Rp. 7.532.654.000,- artinya tetap mengalami perkembangan sebesar 12,68%. Bila dirata-ratakan maka setiap tahun jumlah investasi meningkat sebesar 10,56% selama kurun lima tahun tersebut.

#### 4.4.4. Nilai Produksi

Nilai produksi adalah merupakan hasil produksi dalam menjalankan usaha pada kurun waktu tertentu, atau biasa juga disebut output.

Untuk melihat perkembangan nilai produksi tersebut akan disajikan pada tabel di bawah ini :

**TABEL XVII**  
**PERKEMBANGAN NILAI PRODUKSI PADA INDUSTRI KECIL**  
**DI KABUPATEN WAJO**  
**TAHUN 1994-1998**

Tahun	Nilai Produksi (Rp 000)	Perkembangan (%)
1994	46.098.666	-
1995	38.702.120	-16,04
1996	40.436.782	4,48
1997	41.559.971	2,77
198	44.086.851	6,08

Sumber : Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wajo

Nilai produksi yang dihasilkan pada tahun 1994 adalah sebesar Rp. 46.098.666,- menurun sebanyak Rp 38.702.120.000,- berarti mengalami penurunan sebesar 16,04%, untuk tahun 1995. Tahun 1996 meningkat menjadi Rp. 40.436.782.000,- artinya naik sebesar 4,48%. Untuk tahun 1997 terjadi peningkatan sebanyak Rp. 41.559.971.000,- atau berkembang sebesar 2,77 % sedangkan pada tahun 1998 tetap mengalami kenaikan sebesar Rp. 44.086.851.000,- atau perkembangannya hanya sebesar 6,08% dari tahun sebelumnya. Dengan memperhatikan tabel di atas jumlah pada tahun 1994 sampai 1995 produksi mengalami penurunan sebesar 16,04% sedangkan pada tahun 1995 sampai 1998 mengalami peningkatan sebesar 4,44%.

#### 4.4.5 Nilai Bahan Baku

Penggunaan bahan baku perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL XVIII**  
**PERKEMBANGAN BAHAN BAKU PADA INDUSTRI KECIL**  
**DI KABUPATEN WAJO**  
**TAHUN 1994-1998**

Tahun	Nilai Bahan Baku (Rp 000)	Perkembangan (%)
1994	28.693.446	-
1995	22.683.426	-20,94
1996	25.954.007	14,41
1997	26.743.164	3,04
1998	28.335.321	5,95

Sumber : Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wajo

Dari tabel tersebut nampak bahwa nilai bahan baku yang digunakan pada tahun 1994 sebesar Rp. 28.693.446.000,- penurunannya sebesar 20,94%. Untuk tahun 1996 meningkat menjadi Rp. 25.954.007.000,- atau berkembang sebesar 14,41%. Kemudian pada tahun 1997 mengalami peningkatan menjadi Rp. 26.743.164.000,- atau perkembangannya sebesar 3,04% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 1998 nilai bahan baku adalah Rp. 28.335.321.000,- atau meningkat sebanyak 5,95%. Dilihat secara keseluruhan, maka nilai perkembangan nilai bahan baku pada tahun 1994 sampai 1995 terjadi penurunan sebesar 20,94% sedangkan tahun 1995 sampai 1998 terjadi peningkatan rata-rata perkembangannya sebesar 7,8%.

Perkembangan bahan baku industri kecil yang mengalami perubahan yang tidak menentu. Kadang mengalami penurunan dan kadang mengalami peningkatan. Hal tersebut membawa dampak bagi nilai produksi. Jika nilai bahan baku mengalami penurunan maka nilai produksi juga akan mengalami penurunan. Seperti tahun 1995 (tabel XVIII). Perkembangan bahan baku industri - 20,94% maka perkembangan nilai produksi juga -16,04% (tabel XVII). Meskipun penurunan tidak sama akan tetapi jelas terlihat bahwa antara nilai bahan baku industri dengan nilai produksi terdapat hubungan berbanding lurus.

Melihat perkembangan industri kecil di Kabupaten Wajo sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan adanya perkembangan baik dari segi jumlah perusahaan, tenaga kerja yang diserap, investasi, nilai produksi maupun nilai bahan baku. Hal inilah tentunya yang diharapkan oleh pemerintah dalam usaha



pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, termasuk perluasan kesempatan kerja sehingga dapat menanggulangi masalah ketenagakerjaan.

Setelah melihat perkembangan industri kecil yang ada di Kabupaten Wajo, masih perlu kebijakan baru dalam hubungannya dengan kebijaksanaan masalah kesempatan kerja atau lapangan kerja yang menurut penulis dapat dijadikan solusi adalah perpanjangan proses produksi. Sebab luasnya lapangan kerja yang tersedia akan ditentukan oleh kebijaksanaan investasi dan produksi yang dihasilkan, salah satu usaha untuk memperluas lapangan kerja ini yaitu hendaknya proses produksi diperpanjang dengan jalan mendirikan beraneka ragam industri termasuk industri kecil, contoh suatu industri kecil yang mengolah kelapa menjadi kopra, sebaliknya jangan berhenti sampai menghasilkan satu produk (kopra) tapi diolah lagi menjadi minyak goreng, jadi sabun, mentega dan seterusnya sehingga ini menciptakan industri-industri baru yang kesemuanya akan menciptakan lapangan kerja.

#### **4.5. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Subsektor Industri Kecil di Kabupaten Wajo.**

Untuk mengetahui tingkat produktivitas yang dicapai subsektor industri kecil di Kabupaten Wajo yaitu periode 1994-1998 dengan batasan pembahasan adalah produksi dan jumlah tenaga kerja.

Bahasan tersebut merupakan penilaian kuantitas tentang keberhasilan karyawan atau tenaga kerja dalam meningkatkan produktivitas.

Dengan melihat tabel XV (Perkembangan Tenaga Kerja pada Industri Kecil) dan tabel XVII (Perkembangan Nilai Produksi pada Industri Kecil) hal. 51 di Kabupaten Wajo data di atas dimasukkan ke dalam formulasi produktivitas.

digunakan akan tetapi juga ditentukan oleh faktor-faktor lain. Seperti besarnya investasi dan harga bahan baku, karena ini sangat berpengaruh terhadap jumlah produksi yang dihasilkan. Dengan melihat hal ini bahwa tidak sesuai lagi dengan hipotesis, sebab kita lihat pada tahun 1994 dengan tahun 1995 terjadi penurunan yang sangat besar, sedangkan investasi dan tenaga kerja tetap naik tetapi perolehan bahan baku menurun akibat mahalnya bahan baku tersebut, hal ini mempengaruhi jumlah produksi dan secara tidak langsung mempengaruhi besar kecilnya produktivitas setiap tahunnya.

#### **4.6. Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja pada Subsektor Industri Kecil di Kabupaten Wajo**

Pengembangan industri kecil yang nantinya diharapkan dapat menunjang perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, khususnya pemerataan di dalam pendapatan masyarakat.

Sejalan dengan hal itu pemerintah telah menggalakkan pertumbuhan dan pengembangan industri kecil di seluruh daerah, termasuk Kabupaten Wajo yang merupakan salah satu sentra pengembangan industri kecil. Hal ini mendorong peningkatan jumlah tenaga kerja yang diserap.

Untuk mengetahui tingkat prosentase penyerapan tenaga kerja pada subsektor industri kecil di Kabupaten Wajo atau tingkat kesempatan kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang bekerja pada industri kecil dengan jumlah angkatan kerja pada suatu waktu tertentu.

Dengan rumus sebagai berikut :

$$N = \frac{Pb}{Pc} \times 100\%$$

Dimana : N = Tingkat kesempatan kerja

Pb = Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sub sektor industri kecil pada suatu waktu tertentu.

Pc = Jumlah seluruh angkatan kerja pada suatu waktu tertentu.

Berdasarkan rumus tersebut maka dengan menggunakan data yang nampak pada tabel XV hal. 48 (Jumlah Tenaga Kerja pada Industri Kecil) dan tabel XIII hal. 42 (Jumlah Angkatan Kerja), dapatlah diketahui besarnya tingkat penyerapan tenaga kerja pada subsektor industri kecil di Kabupaten Wajo selama tahun 1994 sampai 1998 sebagai berikut :

Perhitungan daya serap dari tahun 1994-1998 :

$$\begin{aligned} \text{Tahun 1994} &= \frac{26.747}{139.257} \times 100\% \\ &= 19,2\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 1995} &= \frac{27.118}{146.852} \times 100\% \\ &= 18,5\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 1996} &= \frac{27.258}{149.852} \times 100\% \\ &= 18,1\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 1997} &= \frac{27.519}{156.341} \times 100\% \\ &= 17,6\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 1998} &= \frac{27.858}{160.604} \times 100\% \\ &= 17,3\% \end{aligned}$$

Dengan melihat hasil perhitungan tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa pada tahun 1994 tenaga kerja yang dapat diserap industri kecil adalah sebesar 19,2% dari keseluruhan angkatan kerja tahun 1994, dan bekerja diberbagai jenis golongan industri kecil. Hal ini berarti 80,8% bekerja pada berbagai sektor kegiatan seperti pertanian, industri dasar, aneka industri, perdagangan, pegawai dan sampai pada golongan yang menganggur tetapi aktif mencari pekerjaan atau ingin bekerja. Selanjutnya pada tahun 1995 tingkat penyerapan tenaga kerja adalah sebesar 18,5%. Untuk tahun 1997 sebesar 17,6% dan tahun 1998 sebesar 17,3%.

Secara keseluruhan prosentase jumlah angkatan kerja yang ditampung oleh industri hanya berkisar 17,3% sampai 19,2%. Keadaan ini menggambarkan bahwa daya serap subsektor industri kecil terhadap angkatan kerja masih relatif kecil. Ini disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi yang merupakan faktor utama penyebab daya serap sangat rendah karena akibat krisis ekonomi ini menghambat proses produksi, ini mempengaruhi jumlah produksi yang dihasilkan dan secara tidak langsung mempengaruhi daya serap tenaga kerja pada industri kecil.

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka secara kondisional hipotesis yang dikemukakan telah terbukti, sekalipun demikian patut pula diketahui sumbangannya terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten Wajo, paling tidak telah mengupayakan penekanan terhadap pembengkakan sejumlah angkatan kerja tiap tahunnya.

Sehubungan dengan keadaan tersebut, maka selayaknya bila subsektor industri kecil dibina dan dikembangkan secara intensif pada masa-masa mendatang agar peran sertanya lebih dirasakan oleh masyarakat, bukan saja dalam hal penekanan masalah pengangguran melainkan juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam bidang ini.



#### 4.7. Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa pertumbuhan penduduk secara terus menerus menuntut perlunya usaha-usaha pemerintah meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan fasilitas lainnya.

Dalam rangka mengatasi masalah perluasan lapangan kerja, ditempuh kebijaksanaan yang menyeluruh dan-terpadu. Setiap program dan proyek dalam pembangunan sektoral dan regional, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, diarahkan agar dapat menciptakan lapangan kerja produktif seluas mungkin.

Salah satu usaha menanggulangi masalah kelebihan tenaga kerja adalah dengan jalan membina dan mengembangkan industri kecil sehingga dapat secara produktif menyerap tenaga kerja.

Dengan melihat keadaan yang dialami oleh subsektor industri kecil sehubungan dengan usaha untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produksi dalam negeri, maka dalam rangka pertumbuhan/perkembangan perusahaan industri ini, pembinaan dan pengembangan disegala bidang perlu ditingkatkan.

Kebijaksanaan dan langkah-langkah perlu diambil dalam usaha untuk mencapai tujuan pembangunan industri, khususnya pembangunan industri kecil. Adapun kebijaksanaan yang dimaksud disini seperti halnya :

Pemberian pinjaman berupa kredit dengan dasar kelayakan usaha dan bukan lagi atas dasar jaminan, memberikan pendidikan keterampilan dan pembinaan guna meningkatkan mutu dan produktivitas tenaga kerja serta pengembangan keahlian dibidang manajemen dan organisasi. Disamping itu semakin diperluas dan diperbaiki

pembangunan prasarana dan sarana serta penyediaan fasilitas-fasilitas lainnya, yang prinsipnya menunjang pertumbuhan industri-industri tersebut.

Karena industri kecil merupakan usaha rakyat yang pada umumnya termasuk ekonomi lemah dan banyak melibatkan tenaga kerja yang kurang terampil (unskill labour) dan kurang pendidikan, sehingga bagaimanapun juga perkembangannya agak lambat. Juga diketahui bahwa industri kecil pada umumnya memanfaatkan sumber-sumber alam yang tidak dapat diolah secara ekonomis oleh industri besar dan menengah. Oleh karenanya industri kecil ini termasuk didalamnya usaha kerajinan rakyat merupakan kegiatan masyarakat secara keseluruhan dalam pembangunan nasional dan dalam pelaksanaannya akan sesuai dan sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Salah satu bentuk pembinaan yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Departemen Perindustrian adalah berupa bimbingan dan penyuluhan yang pelaksanaannya melalui proyek BIPIK (Bimbingan dan Pengembangan Industri Kecil). Program pembinaan ini dilaksanakan secara berkesinambungan dan terpadu dan sesuai dengan kebijaksanaan Menteri Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Kerajinan, pelaksanaan pembinaannya dipusatkan pada lokasi tertentu yang disebut dengan "sentra" yaitu suatu kelompok industri kecil yang berada dalam satu wilayah dengan jumlah unit usaha satu atau lebih yang dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun tugas BIPIK adalah sebagai berikut :

1. Didirikan untuk mengembangkan sentra-sentra industri (produksi) yang akan terpadu antara program industri kecil dan kerajinan dengan pertanian dan di daerah-daerah pedesaan.
2. Mempertinggi mobilitas kerja angkatan kerja dengan mengolah sumber-sumber ekonomi pedesaan.
3. Mengembangkan motivasi bagi penduduk untuk berusaha di sektor non agraris dalam rangka transformasi sosial.
4. Memperkenalkan pola kehidupan modern dengan cara meningkatkan teknologi yang dapat dikelola dan dapat menyediakana lapangan kerja yang terus mendesak di daerah pedesaan.<sup>21)</sup>

Program pembinaan oleh BIPIK ini mencakup berbagai aspek yang dilaksanakn sesuai dengan karakteristik dan fungsi masing-masing kelompok. Untuk itu program ini dibagi dalam 3 (tiga) kelompok pembinaan yaitu sebagai berikut :

1. Pembinaan industri berdasarkan keterampilan tradisional dititikberatkan pada peningkatan keterampilan teknis dan manajemen, penggunaan mesin/peralatan yang lebih efisien dan dapat meningkatkan mutu, bantuan pemasaran dan pembinaan organisasi.
2. Pembinaan industri penghasil benda-benda seni ditekankan pada pengembangan desain, penelitian/mutu bahan, peningkatan keterampilan.
3. Pembinaan industri pedesaan diarahkan untuk menunjang program nasional dan pembangunan wilayah sendiri serta pembinaan bidang teknis, ekonomi maupun

---

<sup>21)</sup> Proyek Bimbingan dan Pengembangan Industri Kecil (Brosur Departemen Perindustrian, Sulawesi Selatan), 1980, Hal. 3.

sosial akan dilaksanakan melalui peningkatan keterampilan kerja dan penggunaan mesin/peralatan yang efisien serta peningkatan mutu dan pembinaan organisasi serta penyediaan jasa-jasa produksi, pelayanan dan perawatan.

Dengan melihat aspek-aspek tersebut di atas, maka pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa pembinaan tersebut meliputi : penerapan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, peningkatan keterampilan yang menyangkut soal-soal organisasi dan manajemen bagi para pengusaha atau pimpinan perusahaan, sedangkan yang menyangkut proses produksi tentunya bagi pekerja diberikan pendidikan dan latihan guna meningkatkan produktivitas kerjanya. Disamping itu juga pembinaan disegi pelayanan dan perawatan sampai pada soal pemasaran hasil-hasil produksi misalnya dalam bentuk koperasi, guna menunjang kehidupan industri yang bersangkutan.

Program tersebut di atas sebagian telah dilaksanakan di berbagai daerah dengan pemilihan dan jenis komoditi yang sesuai dengan potensi masing-masing wilayah dengan maksud agar sasaran penciptaan lapangan kerja pemerataan pembangunan dapat dicapai.

Khusus industri kecil yang ada di Kabupaten Wajo selain menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, juga tidak terlepas dari berbagai permasalahan/hambatan yang sifatnya intern maupun ekstern, masalah penting yang dihadapi antara lain menyangkut latar belakang pendidikan para pengrajin pada umumnya sekolah dasar sehingga tingkat kemampuan dan keterampilan pengusaha/pengrajin dalam pengelolaan usaha berdasarkan prinsip-prinsip

administrasi masih rendah, penerapan teknologi pada proses produksi masih semi tradisional, sehingga mempengaruhi kualitas produksi, peranan organisasi dan manajemen sepenuhnya belum dimanfaatkan sehingga mempengaruhi kemampuan daya saing pengembangan daya usaha, kemampuan permodalan yang masih rendah dimana fasilitas kredit bank masih terbentur pada masalah penyediaan agunan, dan sistem pembinaan dari berbagai instansi terkait belum terpadu dan tidak berkelanjutan sehingga pengrajin merasakan manfaatnya. Selain itu perlu pula diketahui bahwa soal pemasaran sering pula mengalami hambatan di beberapa perusahaan. Hal ini disebabkan oleh :

1. Kurangnya pengetahuan tentang peluang-peluang pasar yang ada
2. Persaingan produk-produk yang datang dari luar, dan
3. Perubahan musiman yang terasa disegi penjualan.

Sehubungan dengan hal ini semua, oleh pemerintah telah diberikan bantuan dari segi permodalan berdasarkan syarat-syarat kredit permodalan yang ringan, namun belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pengusaha industri kecil ini. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dalam proses pengambilan kredit, disamping itu mereka tidak mempunyai jaminan dalam pengambilan kredit mereka tidak mau menanggung resiko dalam hal biaya.

#### 4.8. Usaha-usaha yang telah ditempuh oleh Pemerintah dalam Pembinaan dan Pengembangan Industri di Kabupaten Wajo.

Pemerintah dalam hal ini Departemen Perindustrian dan Perdagangan telah menempuh berbagai usaha dalam pembinaan dan pengembangan industri di Kabupaten Wajo, dimana pembinaan industri kecil senantiasa diupayakan untuk

menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan, nilai tambah, khususnya industri yang mengolah hasil pertanian, meningkatkan produksi baik jumlah maupun mutunya agar mampu memenuhi permintaan pasar dan produk yang telah memenuhi pasaran ekspor ditingkatkan jumlah dan jenis produksinya. Sentra-sentra industri kecil dan kerajinan pembinaannya ditingkatkan melalui bantuan perangkat lunak dan perangkat keras berupa :

1. Penyuluhan

Penyuluhan GKM bagi pengrajin/pengusaha industri kecil sebanyak 16 orang.

2. Pelatihan

Diklat AMT pengusaha meubel/kerajinan rotan dan pandai besi sebanyak 15 orang. Diklat pengemasan industri kecil pangan diikuti sebanyak 15 orang. Diklat bahan tambahan makanan bagi pengusaha makanan/minuman sebanyak 5 orang. Diklat pengolahan sabut kelapa bagi pengrajin jok kursi sebanyak 2 orang. Diklat keterampilan rotan bagi pengrajin rotan sebanyak 27 orang. Diklat kerang-kerangan sebanyak 20 orang dan pertenunan 25 orang.

3. Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis bagi pengrajin bambu sebanyak 45 orang dan pengrajin tenun sebanyak 55 orang.

4. Lomba Desain

Kegiatan lomba diikuti pengrajin.

5. Konvensi GKM

Konvensi GKM diikuti pengrajin sebanyak 5 orang.

6. Bantuan PERalatan

Masing-masing sentra industri kecil.

7. Bantuan Bahan

Masing-masing sentra industri kecil.

8. Pemasaran

Berbagai upaya telah dilakukan dan akan diberikan kepada industri kecil dalam usaha meningkatkan hasil produksinya antara lain kegiatan pameran dan promosi, baik lokal, nasional, maupun yang bersifat internasional. Salah satu upaya adalah melalui kerja sama antara bapak angkat dan mitra usaha industri menengah dan besar maupun dengan sektor ekonomi lainnya.

9. Perizinan

Kebijaksanaan pemberian izin usaha industri kecil senantiasa berdasarkan SK. Menteri Perindustrian No. 286/M/SK/10/89 tanggal 10 Oktober 1989 kemudian disempurnakan dengan SK. Menteri Perindustrian No. 16 dan 13 dimana tata cara penyelesaiannya disesuaikan dengan kebijaksanaan Pemda Kabupaten Wejo.

Pemberian usaha industri kecil dengan aset kurang dari Rp. 50 juta diterbitkan oleh Kandep. Sedang aset di atas Rp. 50 juta Kandep merekomendasikannya ke Kanwil.

Untuk mengembangkan usaha industri kecil, pemerintah telah menerapkan langkah-langkah kebijaksanaan sebagai berikut :

- a. Program keterkaitan dengan tujuan meningkatkan kemampuan usaha industri kecil dalam pemasaran, pengolahan bahan, pengadaan bahan, pengadaan mesin dan peralatan maupun bantuan teknologi dan manajemen usaha.



- b. Menetapkan jenis-jenis industri tertentu dicadangkan untuk industri kecil yang khusus diusahakan oleh masyarakat golongan ekonomi lemah.
- c. Memajukan usaha-usaha tradisional yang telah tumbuh, dikembangkan melalui penganejaragaman jenis produksi dan perluasan daerah pemasaran.
- d. Peningkatan usaha keterkaitan antara cabang/jenis industri dalam penyediaan bahan baku maupun penyediaan hasil produksi.
- e. Pemanfaatan bahan baku :
  - Potongan kayu dan tripleks untuk bahan baku meubel dan barang kerajinan
  - Serbuk gergaji untuk bahan batu kapur
  - Kerang-kerangan dan sisik untuk pembuatan kerajinan
  - Potongan besi beton untuk bahan bangunan
  - Buah-buahan untuk industri makanan dan minuman

Dalam hal ini pemasaran berbagai upaya telah dilakukan dan akan diberikan kepada pengusaha industri kecil dalam usaha meningkatkan pemasaran hasil produksinya antara lain kegiatan hasil pameran dan promosi yang sifatnya lokal, nasional maupun yang bersifat internasional. Salah satu upaya adalah melalui kerja sama antara babak angkat dengan mitra usaha industri kecil dengan perindustrian menengah dan besar maupun dengan sektor ekonomi lainnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Sebagai rangkuman akhir dari pembahasan yang telah dipaparkan pada bab terdahulu, maka pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Jumlah penduduk di Kabupaten Wajo mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Selama tahun 1994 sampai tahun 1998 pertambahan penduduk sebesar 9.832 jiwa atau dari 396.043 jiwa pada tahun 1994 meningkat menjadi 405.875 jiwa pada tahun 1998. Secara keseluruhan perkembangan jumlah penduduk selama kurun waktu lima tahun tersebut adalah rata-rata bertambah sebesar 2.458 jiwa atau perkembangan realtifnya sebesar 0,61% setiap tahunnya. Dan sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda yang memerlukan gizi dan fasilitas pendidikan yang lebih baik agar dapat menjadi tenaga kerja yang produktif di masa yang akan datang. Selain itu dengan bertambahnya jumlah penduduk secara terus menerus menyebabkan tenaga kerja dan angkatan kerja juga meningkat yang membutuhkan lapangan kerja baru. Sejak tahun 1994 hingga tahun 1998 jumlah tenaga kerja di Kabupaten Wajo mengalami kenaikan sebanyak 25.396 orang tenaga kerja. Secara keseluruhan perkembangan jumlah tenaga kerja setiap tahunnya meningkat rata-rata 2,42%, sedangkan angkatan kerja sebesar 3,6%.
2. Perkembangan industri kecil di Kabupaten Wajo dari tahun ke tahun juga semakin meningkat, baik dari segi jumlah perusahaan, tenaga kerja, investasi dan nilai produksi maupun nilai bahan baku.

Dilihat secara keseluruhan, maka perkembangan jumlah unit usaha selama kurun waktu lima tahun adalah rata-rata bertambah sebesar 0,72% setiap tahunnya, perkembangan jumlah tenaga kerja setiap tahunnya meningkat rata-rata 1,01%, nilai investasi adalah sebesar 10,56%, nilai produksi sebesar 5,68%, dan perkembangan jumlah nilai bahan baku dapat dilihat dari tahun 1994 sampai 1995 perolehannya sebesar 20,94% dan tahun 1995 sampai 1998 yaitu perkembangan sebesar 7,8%.

3. Pada tingkat produktivitas dapat dilihat perkembangannya, bahwa pada tahun 1994 sampai dengan 1995 terjadi penurunan sebesar 17,19%. Ini diakibatkan oleh perolehan bahan baku menurun sehingga produktivitas juga mengalami penurunan. Dan dari tahun 1995 sampai 1998 mengalami perkembangan sebesar 3,50%, dengan demikian peningkatan produktivitas tidak hanya ditentukan oleh besarnya jumlah tenaga kerja tetapi juga faktor-faktor lain seperti besarnya investasi, bahan baku, unit usaha dan lain-lain.
4. Dari segi tingkat kesempatan kerja atau jumlah angkatan kerja yang dapat diserap oleh subsektor industri kecil di Kabupaten Wajo masih relatif kecil yaitu hanya berkisar 17,3% sampai 19,2% yang dapat diserap dari keseluruhan angkatan kerja atau tenaga kerja yang tersedia, dibanding dengan jumlah tenaga kerja yang dapat diserap sektor lain diluar sektor industri kecil.
5. Untuk mengembangkan industri kecil dalam kaitannya dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja khususnya di Kabupaten Wajo, tentunya tidak terlepas kaitannya dengan seluruh potensi yang ada khususnya dari pihak-pihak yang mempunyai wewenang terhadap sektor ini dan sektor ketenagakerjaan.

termasuk partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang berkecimpung dalam sektor industri kecil untuk senantiasa mengupayakan peningkatan dan pengembangan dari sumber daya manusia yang dimanfaatkannya. Sehingga pada gilirannya sektor ini mempunyai kemampuan untuk menjadi tulang punggung perekonomian daerah Kabupaten Wajo umumnya dan peningkatan pendapatan perkapita dari sebagian masyarakat kita, serta dapat menunjang tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor lainnya.

## 5.2. Saran-saran

Sehubungan dengan kesimpulan yang telah penulis uraikan secara sederhana, maka penulis ingin memberikan buah pemikiran untuk dijadikan sebagai saran terhadap pengembangan industri kecil dalam upaya untuk menyerap sejumlah angkatan kerja di Kabupaten Wajo.

1. Agar subsektor industri kecil dapat menampung lebih banyak tenaga kerja, maka hendaknya para pengusaha industri kecil itu agar lebih memperluas usahanya sehingga membuka kesempatan bagi tenaga kerja untuk masuk bekerja, dan kepada tenaga kerja sebelum memasuki pasar kerja maka hendaknya terlebih dahulu membekali diri dengan pendidikan dan meningkatkan keterampilan baik melalui kursus-kursus ataupun latihan-latihan keterampilan, serta mereka diharapkan pula memiliki keahlian manajemen.
2. Dalam upaya memperluas kesempatan kerja pada subsektor industri kecil di Kabupaten Wajo, maka hendaknya pihak Departemen Perindustrian lebih meningkatkan bantuannya kepada para pengusaha dalam mengembangkan usahanya baik berupa pembinaan dan penyuluhan, pemasaran, maupun dalam

pengambilan modal kredit. Kepada pihak perbankan dalam penyaluran kredit tidak terlalu tergantung kepada agunan. Tetapi didasarkan kepada kelayakan usaha industri kecil, sehingga pengusaha industri kecil ini dapat lebih mengembangkan usahanya.

3. Perlu adanya kesinambungan yang terpadu secara lintas sektoral dengan instansi terkait serta pembinaan yang berkelanjutan dalam upaya pengembangan industri kecil dan kerajinan sehingga diharapkan subsektor ini akan dapat tumbuh dan berkembang secara dinamis dalam menopang dan memenuhi tuntutan-tuntutan kehidupan masyarakat yang layak, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang.
4. Untuk pencapaian tujuan pengembangan industri kecil perlu didukung adanya tenaga penyuluh lapangan yang memiliki kemampuan keterampilan dan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan teknis kepada pengrajin tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan peningkatan usaha mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku-Buku

1. Djojohadikusumo, Sumitro, Indonesia Dalam Perkembangan Dunia Kini dan Masa Datang, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Jakarta, 1984.
2. Kusumosuwidho, Sisdiatmo, Dasar-Dasar Demografi, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1981.
3. Meyers L., The Element of Modern Economics (Prentice Hall, Inc.), New York, 1956.
4. Moch. Sadli, Industrial Economics, (Jakarta Bina Kawan Study Club, Universitas Indonesia, 1971), Hal. 49.
5. Rusli, Said, Pengantar Ilmu Kependudukan, LP3ES, Jakarta, 1968.
6. Saleh, Irsan Azhary, Industri Kecil Sebuah Tinjauan dan Perbandingan LP3ES, Jakarta, 1986.
7. Simanjuntak, Payaman J., Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia, Lembaga Penerbitan FE-UH, Jakarta, 1998.
8. Suhartono, R.B., Pola dan Struktur Indonesia, Cetakan I, (Rangkuman Seminar Industrialisasi Dalam Rangka Pembangunan Nasional), Jakarta, CSIS, 1982.
9. Simon Kuznets, Modern Economics Growth, Rate Structure and Spread, (Oxford and Publishing Co: 66 Japanth, New Delhi I, 1965).
10. Sukimo, Sadono, Ekonomi Pembangunan, (Penerbit : Berita Gorat, Medan, 1996).
11. Yudo, Swasono dan Endang Sulistyarningsih, Metode Perencanaan Tenaga Kerja, PBFE, Yogyakarta, 1995.

### II. Peraturan-peraturan/Publikasi Lainnya

1. Departemen Perindustrian Republik Indonesia, Undang undang No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian, Jakarta, 1984, hal.62.

2. Ketetapan MPR No. II/MPR/1988, tentang GBHN (Bahan Penataran dan Bahan Referensi Penataran), Terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1988.
3. Proyek Bimbingan dan Pengembangan Industri Kecil, (Brosur Departemen Perindustrian Sul-Sel, tahun 1980).
4. Sekretariat Jenderal MPR RI, Garis-Garis Besar Haluan Negara (Tap No. II/MPR/1983), Jakarta, 1983.
5. Soemitro Djojohadikusumo, Masalah Penduduk dan Kesempatan Kerja Dalam Prospektif Jangka Panjang, Prasaran Menteri Negara Riset Untuk Seminar Nasional Tentang "Kependudukan dan Tenaga Kerja", Jakarta, Agustus 1977.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Jumlah Penduduk Sulawesi Selatan  
Tahun 1994 - 1998

Tahun	Jumlah Penduduk	Perkembangan	
		Absolut	%
1994	7.310.445	-	-
1995	7.647.492	337.047	4,6
1996	7.738.114	90.622	1,2
1997	7.802.248	64.134	0,8
1998	7.849.214	46.966	0,6

Sumber : BPS Sulawesi Selatan



DATA PERKEMBANGAN INDUSTRI KECIL KABUPATEN WAJO  
TAHUN 1994 - 1998 ( 5 TAHUN )

I. KELOMPOK ILMKA

NO.	TAHUN	UNIT USAHA	TENAGA KERJA	NILAI INVESTASI	NILAI PRODUKSI	NILAI BAHAN BAKU	NILAI TAMBAH
		(ORANG)	(RP.000)	(RP.000)	(RP.000)	(RP.000)	(RP.000)
1.	1994	8.099	22.473	4.410.378	39.733.582 ✓	24.900.740 ✓	14.832.842
2.	1995	8.153	22.767	4.915.689	31.651.020	18.468.135	13.182.885
3.	1996	8.158	22.798	5.007.224	33.327.552	21.538.927	11.788.625
4.	1997	8.173	22.855	5.104.139	34.258.941	22.225.794	12.033.147
5.	1998	8.217	23.103	5.901.586	36.430.391	23.587.032	12.843.359

II. KELOMPOK IHPK :

NO.	TAHUN	UNIT USAHA	TENAGA KERJA	NILAI INVESTASI	NILAI PRODUKSI	NILAI BAHAN BAKU	NILAI TAMBAH
		(ORANG)	(RP.000)	(RP.000)	(RP.000)	(RP.000)	(RP.000)
1.	1994	1.729	4.274	657.786	6.365.084	3.792.706	2.572.378
2.	1995	1.755	4.351	1.084.039	7.051.100	4.215.291	2.835.809
3.	1996	1.790	4.460	1.503.726	7.109.230	4.415.080	2.694.150
4.	1997	1.861	4.664	1.580.528	7.301.030	4.517.370	2.783.660
5.	1998	1.901	4.755	1.631.068	7.656.460	4.748.289	2.908.171

Perkembangan Industri Kecil Kabupaten Wajo  
Tahun 1998 dibanding Tahun 1997.

Tahun	Nilai (Rp.000,-)					
	Tenaga Kerja	Unit Usaha ( orang )	Investasi	Produksi	Bhn. Baku/Penolong	Tambah
1998		27.858	7.532.654	44.086.851	28.335.321	15.751.530
1997		27.519	6.684.667	41.559.971	26.743.164	14.816.807
Pertambahan:	84	339	847.987	2.526.880	1.592.157	934.723
	( 0,84 % )	( 1,23 % )	( 12,68 % )	( 6,08 % )	( 5,95 % )	( 6,31 % )



DATA PERKEMBANGAN INDUSTRI KECIL  
TAHUN 1985

KABUPATEN : WAJO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KODE	NAMA	JUMLAH UNIT USAHA (UNT)			JUMLAH TENAGA KERJA (ORANG)			NILAI (Rp.000)									KETERANGAN	
		FORMAL	KURUMAL	TOTAL	FORMAL	KURUMAL	TOTAL	INVESTASI			PRODUKSI			BAHAN BAKU PENDELONG				
								FORMAL	KURUMAL	TOTAL	FORMAL	KURUMAL	TOTAL	FORMAL	KURUMAL	TOTAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				1.991			4.755			1.641,000			2.026,400				4.145,200	
0001		1	1			9	9			5.000	5.000		195.000	137.000		171.500	134.500	Pengalihan Usaha
0002		3	3			6	6			450	450		3.120	3.120		1.200	1.500	Pengalihan Usaha
0004		30	30			80	80			9.900	9.900		81.000	81.000		56.700	56.700	Pengalihan Usaha
0007		118	118			343	343			32.241	32.241		335.200	218.900		317.000	251.000	Pengalihan Usaha
0012		8	8			16	16			3.000	3.000		15.000	15.000		10.000	10.000	Pengalihan Usaha
0017		14	14			84	84			10.300	10.300		120.000	120.000		204.900	204.900	Pengalihan Usaha
0018		101	101			254	254			23.500	23.500		209.600	209.600		379.700	379.700	Pengalihan Usaha
0019		255	255			800	800			5.500	5.500		878.700	579.700		215.700	579.700	Pengalihan Usaha
0020		30	30			30	30			40.000	40.000		20.000	20.000		35.000	21.000	Pengalihan Usaha
0025		3	3			25	25			10.000	10.000		120.000	120.000		72.000	72.000	Pengalihan Usaha
0028		16	16			42	42		30.000			20.000			105.000	72.000		
0031		4	4		42					14.500	14.500		204.200	216.700		157.300	157.300	Pengalihan Usaha
0032		37	37			130	130			300	300		43.500	43.500		30.500	30.500	Pengalihan Usaha
0037		3	3			5	5			4.000	4.000		140.400	140.400		87.500	87.500	Pengalihan Usaha
0038		340	340			340	340			4.000	4.000		64.000	64.000		20.500	20.500	Pengalihan Usaha
0040		117	117			42	42			15.000	15.000		192.000	192.000		120.000	120.000	Pengalihan Usaha
0041		6	6			25	25			11.000	11.000		102.000	102.000		62.000	62.000	Pengalihan Usaha
0042		10	10			24	24		61.200	114.000	109.140	12.200	30.000	147.000	21.200	18.400	18.400	Pengalihan Usaha
0043		4	4		20					800	800		11.700	11.700		6.200	6.200	Pengalihan Usaha
0044		3	3			5	5			1.500	1.500			0				Pengalihan Usaha
0045		2	2			5	5			1.000	1.000			0				Pengalihan Usaha
0046		1	1		5				1.000				3.800	7.500		4.800	4.800	Pengalihan Usaha
0047		13	13			13	13			100	100		3.800	3.800		2.000	2.000	Pengalihan Usaha
0048		3	3			3	3			14.500		14.500		43.500		43.500		
0049		4	4		15					5.800	5.800		24.700	24.700		14.800	14.800	Pengalihan Usaha
0050		2	2		15					6.800	6.800		178.000	178.000	14.000	11.000	11.000	Pengalihan Usaha
0051		66	66			190	190			18.100	18.100		212.000	212.000	200.200	420.000	420.000	Pengalihan Usaha
0052		3	3		32					30.700	30.700		78.700	78.700		27.200	27.200	Pengalihan Usaha
0053		11	11		14					4.500	4.500		8.800	8.800		6.800	6.800	Pengalihan Usaha
0054		21	21			64	64			394	394		21.000	21.000		10.000	10.000	Pengalihan Usaha
0055		3	3			8	8			500	500		20.000	20.000		140.000	140.000	Pengalihan Usaha
0056		6	6			5	5			16.800	16.800		21.000	21.000		13.200	13.200	Pengalihan Usaha
0057		485	485			750	750			400	400		1.800	1.800		1.100	1.100	Pengalihan Usaha
0058		3	3			7	7			130	130		60.000	60.000		36.000	36.000	Pengalihan Usaha
0059		3	3			5	5			1.500	1.500		107.000	107.000		131.500	131.500	Pengalihan Usaha
0060		5	5			21	21			1.300	1.300							Pengalihan Usaha
0061		15	15			139	139			440.710	440.710	200.000	1.025.100	1.025.100	142.000	900.500	900.500	Pengalihan Usaha
0062		80	80			900	900		90.000	300.000	210.000	40.000	200.000	300.000	40.000	300.000	300.000	Pengalihan Usaha
0063		14	500	300	60	50	180		44.000	200.000	200.000		310.000	320.000		25.000	25.000	Pengalihan Usaha
0064		3	30	33	14	13	13			13.994	13.994	21.500	700.000	700.000	100.000	13.000	13.000	Pengalihan Usaha

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
3211			73	74			813	822	10,500	75,75	485,75	8,000	77,500	7,721	48,425	521,240	Perbaikan Gedung	
3212			56	58			477	477		183,77	183,77		3,853,330	38,533	2,195,800	2,195,800	Perbaikan Gedung	
3213			95	95			254	254		15,750	19,800		3,827,000	37,000	2,000,000	2,000,000	Perbaikan Gedung	
3214			7	7			14	14		2,000	2,000		500,000	50,000	40,500	40,500	Perbaikan Gedung	
3215									3,000			15,000		15,000	100,000	100,000	Perbaikan Gedung	
3216			480	480			500	500		18,572	20,772		8,000,000	80,000	8,400,000	8,400,000	Perbaikan Gedung	
3217	25		1,736	1,761	830		12,141	12,782	1,062,300	37,643	3,436,000	2,677,700	13,750,000	140,254	1,918,000	1,918,000	Perbaikan Gedung	
3218			7	7			10	10		1,790	1,790		6,000	6,000	20,100	20,100	Perbaikan Gedung	
3219			50	50			425	425		2,552	45,092		4,817,800	79,270	20,100	20,100	Perbaikan Gedung	
3220			10	10			36	36		6,610	3,310		12,700	12,700	65,000	65,000	Perbaikan Gedung	
3221			30	30			40	40		420	70		100,000	6,000			Perbaikan Gedung	
3222	6		10	10			673	673		61,76	10,277	21,440	67,100	1,100	7,110	60,000	60,000	Perbaikan Gedung
3223	1									1,500		1,300		2,000	12,500		12,500	Perbaikan Gedung
3224	1									4,800		21,500			12,700		12,700	Perbaikan Gedung
3225			2	2						3,000	3,000		9,770	9,770	4,500	4,500	Perbaikan Gedung	
3226	1									6,224	8,224	12,000		12,000	10,000	10,000	Perbaikan Gedung	
3227			10	10			15	15		4,620	3,420	5,000	14,300	15,600	2,600	9,600	9,600	Perbaikan Gedung
3228			5	5			90	90		500	500		25,000	17,000	15,000	17,000	Perbaikan Gedung	
3229			3	3			6	6		70	70		17,000	17,000	8,000	8,000	Perbaikan Gedung	
3230			3	3						83,000		41,500		41,500	74,000	74,000	Perbaikan Gedung	
3231	2									61,441		61,441	22,200	22,200	107,000	107,000	Perbaikan Gedung	
3232	5									28,627	17,300	18,800	47,300	27,700	23,210	36,500	36,500	Perbaikan Gedung
3233			9	10						1,079					3,600	3,600	Perbaikan Gedung	
3234			1	1						13,757	1,000	17,740	6,000	6,000	1,200	7,200	7,200	Perbaikan Gedung
3235			3	4						6,500	6,500		45,000		30,000	30,000	Perbaikan Gedung	
3236			7	7						11,130	13,130		100,000	100,000	20,000	20,000	Perbaikan Gedung	
3237			56	56			100	100		11,000	6,200	90,000	53,000	63,000	31,700	31,700	Perbaikan Gedung	
3238			10	10			27	27		14,300	15,200			0		0	Perbaikan Gedung	
3239			60	60			27	27		15,500	15,500				12,000	12,000	Perbaikan Gedung	
3240			1	1			30	30		1,250	1,250		11,000	11,000	7,000	7,000	Perbaikan Gedung	
3241			1	1						1,500	1,500		20,000	20,000	11,000	11,000	Perbaikan Gedung	
3242			1	1						20,900	20,900		20,000	20,000	20,000	20,000	Perbaikan Gedung	
3243			1	1						1,000	1,000	17,200	46,000	50,000	50,000	50,000	Perbaikan Gedung	
3244			17	17			100	100		1,000	1,000		3,000	3,000	1,600	1,600	Perbaikan Gedung	
3245			4	4						17,300	17,300	61,500		10,000	40,000	22,400	22,400	Perbaikan Gedung
3246			1	1						28,400	5,100	6,600	21,600	28,000	23,700	100,000	100,000	Perbaikan Gedung
3247	1									28,400	60,820	10,000	31,700	38,200	23,700	700	700	Perbaikan Gedung
3248	2		30	32			100	100		1,000	20,300	20,300	1,000	1,000	100,000	100,000	Perbaikan Gedung	
3249	2		43	44			2	2		1,500	1,500		10,000	10,000	20,000	20,000	Perbaikan Gedung	
3250	4		1	1						2,200	2,200		30,000	30,000	14,900	14,900	Perbaikan Gedung	
3251			9	9						15,000	15,000		15,000	15,000	45,000	45,000	Perbaikan Gedung	
3252			9	9			41	41		8,000	8,000		80,000	80,000	30,000	30,000	Perbaikan Gedung	
3253			19	19			20	20		10,000	10,000	600,000	30,000	30,000	16,000	16,000	Perbaikan Gedung	
3254			3	3			147	147		1,500	1,500		14,500	14,500	9,500	9,500	Perbaikan Gedung	
3255			80	80			4	4							70,000	70,000	Perbaikan Gedung	
3256			2	2			57	57		17								Perbaikan Gedung

Nilai

1.60.000  
Terdapat Rp. 1.600.000

Kantor Industri dan  
Perdagangan  
Mansur